



**KOMITE STANDAR  
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**  
GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE



# Laporan Tahunan

## *Annual Report*

# 2024

# Laporan Tahunan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dari Tahun ke Tahun

1



## Laporan Tahunan 2023

*Percepatan Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Memenuhi Tuntutan Perubahan, Kebutuhan Pemangku Kepentingan, dan Kesesuaian dengan Standar Internasional*

2



## Laporan Tahunan 2022

*Percepatan Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mengawal Akuntabilitas Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi*

## Tim Penyusun

**Pengarah** - Sumiyati (Ketua Komite Kerja KSAP)

**Penanggung Jawab** - Esti Dwi Arvina (Kasubdit SAP)

**Pemimpin Redaksi** - Achmad Fauzi (Kepala Seksi FKSAP)

**Kontributor** - Satria Mahardika - Eka Rizkia Nabila

## SAMBUTAN KETUA KOMITE KONSULTATIF



# ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Ketua Komite Konsultatif KSAP

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan KSAP Tahun 2024 dengan tema “Akselerasi Penyelesaian Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Rangka Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah”.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Implementasi SAP yang konsisten dan tepat akan menjadi landasan yang kokoh dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Tema yang diusung pada kesempatan ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana tantangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah semakin kompleks.

Oleh karena itu, akselerasi dalam implementasi SAP merupakan langkah yang strategis dan mendesak untuk dilakukan. Kami di KSAP berkomitmen untuk terus mendukung percepatan penyusunan SAP melalui berbagai upaya, termasuk penyempurnaan standar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Laporan Tahunan ini menyajikan rangkuman kegiatan KSAP dalam satu tahun terakhir, termasuk penyusunan standar baru, revisi standar yang ada, serta berbagai kegiatan sosialisasi. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan penerapan SAP di Indonesia.

Kami menyadari bahwa perjalanan menuju penyelesaian seluruh SAP masih panjang. Namun, kami optimis bahwa dengan dukungan dan kerja sama dari semua pihak,

tujuan untuk memiliki SAP yang komprehensif dan berkualitas tinggi dapat segera tercapai.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian yang telah diraih dan tantangan yang masih dihadapi dalam upaya akselerasi penyelesaian SAP. Kami juga mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KSAP. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Januari 2025  
Ketua Komite Konsultatif KSAP,



**Astera Primanto Bhakti**

***“Kami di KSAP berkomitmen untuk terus mendukung percepatan SAP melalui berbagai upaya, termasuk penyempurnaan standar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.”***

## LAPORAN KETUA KOMITE KERJA



# SUMIYATI

Ketua Komite Kerja KSAP

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya, KSAP dapat menyelesaikan berbagai capaian signifikan pada tahun 2024. Dengan mengusung tema “Akselerasi Penyelesaian Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Rangka Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah”, KSAP berkomitmen untuk terus menyempurnakan standar akuntansi pemerintahan.

## Capaian Kinerja Tahun 2024

Selama tahun ini, KSAP telah berhasil:

- Mengesahkan dua Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) baru, yaitu PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran dan PSAP 19 Pengaturan Bersama melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2024 dan PMK Nomor 133 Tahun 2024
- Melakukan finalisasi beberapa draf PSAP penting, seperti Agrikultur, Imbalan Kerja, Provisi, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi dan paket PSAP Instrumen Keuangan.

- Melakukan proses revisi terhadap Kerangka Konseptual dan beberapa PSAP yang ada untuk meningkatkan kualitas dan relevansi diantaranya: PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, 02 LRA Berbasis Kas, 07 Aset Tetap, 13 Penyajian LK BLU, dan 05 Persediaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KSAP dalam setahun terakhir juga memberikan fasilitasi konsultasi penerapan SAP kepada instansi pemerintah dengan mengeluarkan surat jawaban konsultasi yang telah dibukukan menjadi buku Bunga Rampai SAP Tahun 2024.

Selain itu, KSAP juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan SAP dan menghasilkan Karya Tulis dalam bentuk makalah, majalah, dan artikel ilmiah terkait dengan standar akuntansi pemerintahan yang disusun oleh anggota KSAP yang dipublikasikan melalui media sosial KSAP.

Dalam rangka kontribusi terhadap dunia pendidikan dan mengenalkan SAP kepada mahasiswa dan dosen, KSAP melaksanakan kegiatan *KSAP Goes to Campus* bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Perguruan Tinggi Negeri. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Juli dan September 2024 di tiga lokasi, yaitu di Universitas Tanjungpura Pontianak, Universitas Tadulako Palu, dan Universitas Andalas Padang.

KSAP telah berhasil menghadapi berbagai tantangan dan meraih beberapa capaian penting di tahun 2024. Kami berharap, dengan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas SAP, kami dapat berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efektif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KSAP. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin di masa mendatang.

**Jakarta, Januari 2025**  
**Ketua Komite Kerja KSAP,**



**Sumiyati**

***“Kami berharap, dengan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas SAP, kami dapat berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efektif.”***

# Daftar Isi



**Sambutan Ketua  
Komite Konsultatif**



**Laporan Ketua  
Komite Kerja**



**Daftar Isi**



**Executive Summary**



**Kaleidoskop  
Tahun 2024**



**Profil dan  
Keanggotaan KSAP**



**Produk KSAP dan  
Proses Penyusunan SAP**



**Capaian Kinerja  
KSAP Tahun 2024**



**Rencana Kerja  
Tahun 2025**



**Mengenal PSAP Baru**



**Laporan Pelaksanaan  
Tugas Kesekretariatan  
dan Pengelolaan  
Keuangan KSAP**



**Penutup**

# Executive Summary

Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam upaya KSAP untuk terus mendorong peningkatan kualitas dan transparansi pelaporan keuangan pemerintah. Fokus utama tahun ini adalah pada akselerasi penyelesaian berbagai draf PSAP yang bertujuan untuk menyelaraskan praktik akuntansi pemerintah dengan standar akuntansi internasional, sehingga laporan keuangan pemerintah menjadi lebih relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.

KSAP berhasil menyelesaikan dua PSAP prioritas yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah, yaitu PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran dan PSAP 19 Pengaturan Bersama. Penyelesaian PSAP ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan relevansi informasi keuangan yang disajikan.

Selain itu, KSAP juga telah berhasil menyusun draf Final PSAP yang akan diajukan proses pengesahan melalui Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK), yaitu draf PSAP Imbalan Kerja dan draf PSAP Agrikultur. Lebih lanjut, KSAP juga sedang dalam tahap melakukan finalisasi atas beberapa draf PSAP yang telah mendapatkan pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu draf PSAP Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi, draf PSAP Instrumen Keuangan, draf PSAP Instrumen Keuangan – Penyajian, dan draf PSAP Instrumen Keuangan – Pengungkapan.

Penyelesaian dan implementasi PSAP secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan SAP.

Meskipun telah mencapai sejumlah kemajuan, KSAP masih menghadapi beberapa tantangan dalam proses akselerasi penyelesaian PSAP, seperti kompleksitas isu akuntansi sektor publik, keterbatasan sumber daya, dan resistensi terhadap perubahan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, KSAP akan terus melakukan berbagai upaya, antara lain:

- KSAP akan terus melakukan kajian dan pengembangan standar akuntansi yang lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi sektor publik di Indonesia; dan
- KSAP akan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keselarasan dalam implementasi PSAP.

Dengan segala capaian yang telah diraih, KSAP berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan relevansi PSAP. Ke depannya, KSAP akan semakin berfokus pada pengembangan standar yang responsif terhadap dinamika lingkungan bisnis dan pemerintahan, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan implementasi PSAP.

**01**  
**Kaleidoskop**  
**Tahun 2024**

## Januari

Selama bulan Januari 2024, KSAP menyelenggarakan Rapat Pleno Mingguan sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda draf PSAP Sewa, draf PSAP Agrikultur, revisi draf PSAP Kerangka Konseptual, dan draf PSAP Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. KSAP juga menyelenggarakan Rapat Pleno Komite Kerja dengan agenda pembahasan pelaporan capaian tahun 2023 dan penyusunan rencana kerja 2024. Selain itu, KSAP juga menyelenggarakan 1 (satu) kali kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan agenda pembahasan mengenai revisi Draft PSAP 13 Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan 1 (satu) kali Rapat Tim Kecil Penyusun PSAP Penurunan Nilai Unit Penghasil Kas.

## Februari

Selama bulan Februari 2024, KSAP menyelenggarakan Rapat Pleno Mingguan sebanyak 2 (dua) kali dengan agenda pembahasan draf paket PSAP Instrumen Keuangan dan revisi draf PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas. Selain itu, KSAP juga menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Tim Kecil Penyusun PSAP Penurunan Nilai Unit Penghasil Kas. KSAP juga menyelenggarakan 1 (satu) kali kegiatan FGD dengan agenda pembahasan Diskusi draf Pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 3 draf PSAP Instrumen Keuangan.



## Maret

Selama bulan Maret 2024, KSAP menyelenggarakan Rapat Pleno Mingguan sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda pembahasan draf PSAP Provisi, Kewajiban Kontigensi, Aset Kontigensi, revisi draf PSAP 07 Aset Tetap, draf PSAP Selisih Kurs, dan revisi draf PSAP 05 Persediaan. Selain itu, KSAP juga menerima kunjungan konsultasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dengan agenda konsultasi mengenai laporan keuangan dan kunjungan konsultasi dari Pemerintah Daerah Sumba Timur dengan agenda konsultasi terkait pelaporan keuangan.

## April

Selama bulan April 2024, KSAP menyelenggarakan Rapat Pleno Mingguan sebanyak 2 (dua) kali Rapat Pleno Mingguan dengan agenda pembahasan draf PSAP Investasi pada Asosiasi dan PSAP Imbalan Sosial.

## Mei

Selama bulan Mei 2024, KSAP menyelenggarakan Rapat Pleno Mingguan sebanyak 2 (dua) kali dengan agenda pembahasan revisi draf PSAP 13 Penyusunan Laporan Keuangan BLU dan revisi draf Paket PSAP Instrumen Keuangan. KSAP juga menyelenggarakan Rapat Pleno Komite Kerja. Selain itu, KSAP juga menyelenggarakan Rapat Pembahasan RPKM untuk PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran dan PSAP 19 Pengaturan Bersama. KSAP juga menerima kunjungan konsultasi dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan agenda konsultasi terkait properti investasi dan penyajian belanja modal untuk pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

## Juni

Selama bulan Juni 2024, KSAP menyelenggarakan Rapat Pleno Mingguan sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda pembahasan revisi draf PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP Penurunan Nilai Aset Non Penghasil Kas, dan revisi draf PSAP 13 Penyusunan Laporan Keuangan BLU. KSAP juga menyelenggarakan Rapat Pleno Komite Konsultatif. Selain itu, KSAP juga menyelenggarakan 4 (empat) kali Rapat Tim Kecil dengan agenda pembahasan draf PSAP Penurunan Nilai Unit Penghasil Kas dan Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran. KSAP juga menerima kunjungan konsultasi dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian dengan agenda pembahasan aset tak berwujud dan Pemerintah Kota Tarakan dengan agenda pembahasan terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

## Juli

Selama bulan Juli 2024, KSAP menyelenggarakan Rapat Pleno Mingguan sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda pembahasan draf PSAP Pendapatan, Kerangka Konseptual, revisi draf PSAP 13 Penyusunan Laporan Keuangan BLU, revisi draf PSAP 07 Aset Tetap, dan PSAP Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. KSAP juga menerima kunjungan konsultasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati dengan agenda pembahasan terkait tindak lanjut temuan BPK dan kunjungan konsultasi dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. KSAP juga menyelenggarakan kegiatan *KSAP Goes to Campus* yang dilaksanakan di Universitas Tanjungpura Pontianak dan FGD PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan dan PSAP 04 Catatas atas Laporan Keuangan.

## Agustus

Selama bulan Agustus 2024, KSAP menyelenggarakan Rapat Pleno Mingguan sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda pembahasan draf PSAP Investasi, revisi draf PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, revisi draf PSAP 07 Aset Tetap, dan PSAP Biaya Pinjaman. KSAP juga menyelenggarakan 4 (empat) kali Rapat Tim Kecil dengan agenda pembahasan draf Revisi Draft PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan PSAP Penurunan Nilai Aset Penghasil Kas. KSAP juga menyelenggarakan kegiatan FGD sebanyak 2 (dua) kali dengan agenda pembahasan Revisi Draft PSAP Kerangka Konseptual dan Draft PSAP Pengukuran serta Revisi Draft PSAP 07 Aset Tetap. KSAP juga menyelenggarakan 2 (dua) kali kegiatan FGD dengan agenda pembahasan Revisi Draft PSAP 07 Aset Tetap dan Revisi Draft PSAP Kerangka Konseptual dan Draft PSAP Pengukuran.



## September

Selama bulan September 2024, KSAP menyelenggarakan Rapat Pleno Mingguan sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda pembahasan draf PSAP Penurunan Nilai Aset Penghasil Kas, Revisi Draft PSAP Persediaan, dan PSAP Penurunan Nilai Aset Non Penghasil Kas. KSAP juga menyelenggarakan Rapat Pleno Komite Kerja dengan agenda pembahasan terkait perubahan Keputusan Presiden dan Statuta KSAP. Selain itu, KSAP juga menyelenggarakan Rapat Tim Kecil sebanyak 1 (satu) kali dengan agenda pembahasan draf PSAP Penurunan Nilai Aset Non Penghasil Kas. KSAP juga menyelenggarakan kegiatan KSAP *Goes to Campus* yang dilaksanakan di Universitas Tadulako Palu dan Universitas Andalas Padang dan FGD dengan agenda pembahasan PSAP 7, PSAP 10 dan PSAP 17.



## Oktober

Selama bulan Oktober 2024, KSAP menyelenggarakan Rapat Pleno Mingguan sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda pembahasan draf PSAP Imbalan Sosial, PSAP Pengungkapan Sektor Pemerintahan Umum, revisi draf PSAP 13 Penyusunan Laporan Keuangan BLU, PSAP Selisih Kurs, dan PSAP Pengukuran. KSAP juga menyelenggarakan Rapat Pembahasan Perubahan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan serta draf PSAP 20 Imbalan Kerja dan draf PSAP 21 Agrikultur yang Menjadi Lampiran RPMK PSAP 20 dan 21 dan FGD RPMK PSAP 20 dan 21.

KSAP juga menerima kunjungan konsultasi sebanyak 5 (lima) kali dari Pemerintah Kota Semarang dengan agenda konsultasi terkait Buletin Teknis Nomor 16, 14, dan 20, Pemerintah Kota Tarakan dengan agenda konsultasi terkait koordinasi standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan agenda konsultasi terkait properti investasi, Pemerintah Kota Bekasi dengan agenda konsultasi terkait standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan agenda konsultasi terkait denda pajak.

## November

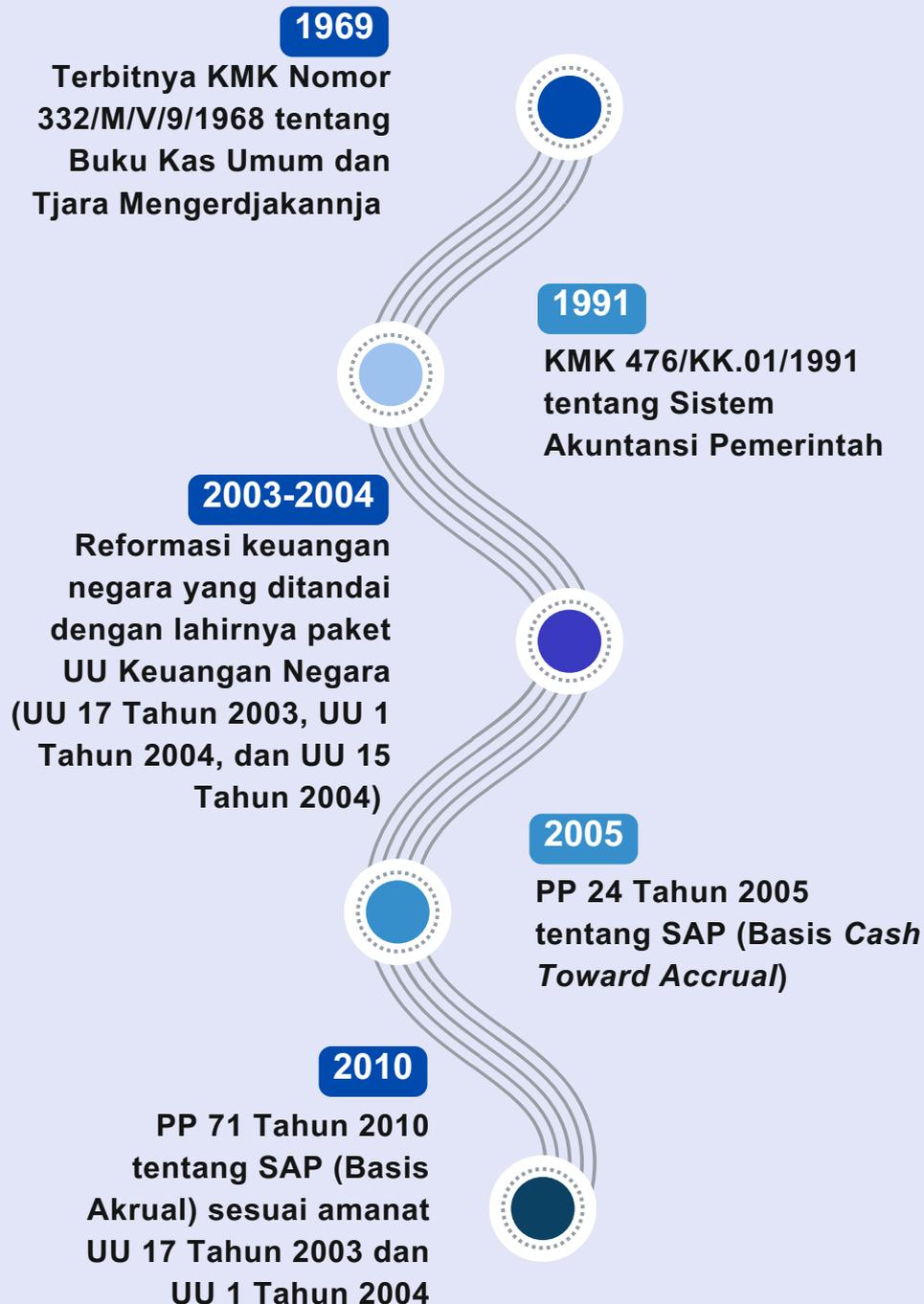
Selama bulan November 2024, KSAP menyelenggarakan Rapat Pleno Mingguan sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda pembahasan draf PSAP Investasi, paket draf PSAP Instrumen Keuangan, dan PSAP Penurunan Nilai Aset Non Penghasil Kas. KSAP juga menyelenggarakan 2 (dua) kali FGD dengan agenda pembahasan revisi draf PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan PSAP Investasi. KSAP juga menerima kunjungan konsultasi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan agenda konsultasi terkait SAP dan kebijakan akuntansi dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan agenda pembahasan PSAP 16 dan PSAP 17.

## Desember

Selama bulan Desember 2024, KSAP menyelenggarakan Rapat Pleno Mingguan sebanyak 1 (satu) kali dengan agenda pembahasan draf PSAP Biaya Pinjaman dan PSAP Pengaturan Bersama. KSAP juga menyelenggarakan Rapat Komite Konsultatif dengan agenda pembahasan pergantian keanggotaan KSAP, penerapan Paket PSAP Instrumen Keuangan, rencana pengembangan standar akuntansi pemerintahan, dan *Update on IPSAS Sustainability Reporting*. KSAP juga menyelenggarakan Rapat Tim Kecil sebanyak 1 (satu) kali dengan agenda pembahasan draf PSAP Penurunan Nilai Aset Penghasil Kas.

Selain itu, KSAP juga menerima kunjungan konsultasi dari Pemerintah Kota Bekasi dengan agenda konsultasi terkait koordinasi dengan narasumber dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pengelola akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan agenda konsultasi terkait kebijakan akuntansi.

# Perjalanan Standar Akuntansi Pemerintahan dari Masa ke Masa



**02**

**Profil dan  
Keanggotaan  
KSAP**

Sebelum adanya reformasi keuangan negara pada tahun 2003-2004, sesuai dengan Pasal 35 PP 105 tahun 2000, penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia belum memiliki standar akuntansi pemerintahan yang berlaku secara nasional.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi tonggak sejarah penting bagi pengelolaan keuangan pemerintah Indonesia. Terbitnya UU ini membawa pengaruh yang luar biasa di setiap sisi keuangan mulai dari hulu ke hilir, serta menjadi landasan penting bagi organisasi KSAP. Undang-Undang Keuangan Negara menyatakan bahwa penyusunan dan pemberlakuan standar akuntansi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah harus disusun oleh komite yang independen serta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Seiring mendesaknya kebutuhan akan SAP dan selama menunggu terbitnya PP tentang Komite Standar, pada tanggal 13 Juni 2002 terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.012/2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang bertugas menyusun konsep SAP pusat dan daerah.

Keanggotaan KSAP dibentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004 yang telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 16 Oktober 2017.

Pembentukan KSAP merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa “bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.” Kemudian, dalam Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa “dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.”

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa “Komite Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah.”

Sesuai dengan Pasal 7 Keppres Nomor 84 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan. KSAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.”

Sesuai dengan Pasal 57 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “keanggotaan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat ini berasal dari profesional di bidang akuntansi dan berjumlah sebanyak-sebanyaknya 9 (sembilan) orang yang ketua dan wakil ketuanya dipilih dari dan oleh anggota.” Keanggotaan KSAP saat ini berasal dari berbagai unsur pemerintahan, praktisi, asosiasi profesi, dan akademisi yang mempunyai kompetensi akademik di bidang akuntansi sektor publik, register akuntan negara dan reputasi baik di bidang profesi akuntansi.

Dalam bertugas KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak lain yang dianggap perlu.

Sesuai dengan Bab X Pasal 36 Ayat (1) mengenai Ketentuan Peralihan UU Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa “ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.” Kemudian dalam Bab XIII Pasal 70 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 juga dinyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”

Mengacu pada ketentuan peralihan pada UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, dalam rangka strategi menuju penerapan *accrual-based accounting*, KSAP telah menyusun SAP berbasis kas menuju akrual (*cash towards accrual*) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP pada tanggal 13 Juni 2005.

Selanjutnya, KSAP menyusun SAP berbasis akrual yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 22 Oktober 2010. Secara garis besar, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur mengenai:

- SAP Berbasis Akrual (terdapat pada Lampiran I);
- SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (bersifat transisi dan terdapat pada Lampiran II); dan
- Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Lampiran III) yang terdiri dari latar belakang, kedudukan dan peran serta tugas Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), proses penyusunan SAP berbasis akrual, perbedaan mendasar antara SAP Berbasis Akrual dengan SAP berbasis kas menuju akrual dan Implementasi SAP Berbasis Akrual

Hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.” Penjelasan pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perubahan” adalah penambahan, penghapusan, atau penggantian satu atau lebih PSAP.

#### Visi

”Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas.”

#### Misi

- Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
- Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan.

## Tujuan

- Menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional.
- Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Meningkatkan profesionalisme dan independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

## Nilai Dasar KSAP

### Independen

Anggota KSAP menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu demi kepentingan semua pihak.

### Profesionalisme

Anggota KSAP membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kode etik yang berlaku.

### Demokratis

Anggota KSAP menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dengan mengedepankan kemufakatan dalam pengambilan keputusan.

### Universal

Anggota KSAP membangun Standar Akuntansi Pemerintahan bersikap objektif dengan mengedepankan universalitas agar dapat diterapkan pada semua entitas pelaporan dan diterima oleh para pemangku kepentingan.

# Komite Konsultatif KSAP

01

## **Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax.**

### **Ketua merangkap Anggota Komite Konsultatif**

Direktur Jenderal Perbendaharaan saat ini dijabat oleh Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax. Dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada 23 Januari 2017, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada 26 Juni 2018, dan pada 1 November 2022 diamanatkan menjadi Direktur Jenderal Perbendaharaan.

02

## **Dr. Drs Agus Fatoni, M.Si.**

### **Wakil Ketua merangkap Anggota Komite Konsultatif**

Direktur Jenderal Keuangan Daerah saat ini dijabat oleh Dr. Drs Agus Fatoni, M.Si. Jabatan lain yang pernah dijabat adalah Kepala Biro Administrasi Pimpinan Kemendagri, Plt Sekretaris Fasilitas Kerjasama, Sekretaris Korpri, Kepala Sekretaris Pribadi Mendagri.

03

## **Dr. Ardan Adiperdana**

### **Anggota Komite Konsultatif**

Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI Periode 2022-2026 dijabat oleh Dr. Ardan Adiperdana yang merupakan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) periode Maret 2015-Juni 2019. Saat ini menjadi Staf Khusus I Menteri BUMN sejak Maret 2021 dan sebelumnya menjadi Staf Khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Akuntabilitas pada 2020-2021.

## Komite Konsultatif KSAP

04

### **Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA.**

#### Anggota Komite Konsultatif

Sebagai anggota dari kalangan profesional, sebelumnya menjabat sebagai Deputy Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan-BPKP, sebelumnya menjabat sebagai Deputy Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian. Saat ini aktif sebagai anggota *Forum Corporate Governance* Indonesia, Anggota Dewan Pertimbangan Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Manajemen, Anggota *Institute Management Accountant* dan Anggota *Institute of Internal Auditor*.

05

### **Prof. Dr. Mardiasmo, SE., AK., MBA.**

#### Anggota Komite Konsultatif

Sebagai anggota kalangan profesional, pada Kabinet Kerja Pemerintahan Indonesia periode 2014-2019, beliau dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan sekaligus aktif sebagai Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *ex-officio* dari Kementerian Keuangan. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2010–2014 dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI pada periode 2006-2010. Saat ini juga aktif sebagai Komisaris pada PT Taspen (Persero), Dewan Pengawas RS. Fatmawati, dan Ketua Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).



## Tugas Komite Konsultatif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tugas Komite Konsultatif adalah memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 dimaksud, tugas Komite Konsultatif kemudian diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Komite Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP.”

# Komite Kerja KSAP

01

## **Sumiyati, Ak., MFM.**

### **Ketua merangkap Anggota Komite Kerja**

Saat ini aktif sebagai Komisaris Indonesia *Financial Group* (IFG), Komite Audit Indonesia *Investment Authority* (INA), Komite Audit Kementerian Keuangan dan Komite Audit Kementerian Kesehatan. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dan Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

02

## **Dr. Dwi Martani, CA, CPA**

### **Wakil Ketua merangkap Anggota Komite Kerja**

Saat ini merupakan staf pengajar Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) sejak 1993 dan anggota Komite Audit PT Saka Energi Indonesia sejak 26 Desember 2021. Selain itu, juga aktif sebagai Anggota Dewan Pengarah Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia sejak 2013, Anggota Komite Akuntansi, Badan Pengelola Keuangan Haji sejak 2019, dan Anggota Tim Teknis Narasumber Kebijakan Akuntansi Keuangan Gabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 2022.

03

## **Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., MSc.**

### **Sekretaris merangkap Anggota Komite Kerja**

Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji sejak tahun 2022. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan dan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pada tahun 2012 sampai dengan 2015, menjabat sebagai Inspektur VI pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

## Komite Kerja KSAP

04

### **Dr. Jan Hoesada, Ak., MM.**

---

#### Anggota Komite Kerja

Saat ini menjadi pimpinan PT Multi Prima Widya *Consultant*. Di sela-sela kesibukan mengelola kantor, juga menjadi staf pengajar di beberapa perguruan tinggi, di antaranya Magister Manajemen UI, Universitas Bina Nusantara dan Magister Teknik UI. Dr. Jan Hoesada memiliki pengalaman kerja diawali sebagai asisten auditor pada Kantor Akuntan Hanadi Rahardja. Anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan sejak 1990 sampai sekarang.

05

### **Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM**

---

#### Anggota Komite Kerja

Saat ini bertugas sebagai Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pernah bertugas sebagai Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

06

### **Dr. Hamdani, Ak., MM, M.Si**

---

#### Anggota Komite Kerja

Saat ini beliau merupakan Dosen pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang (Februari 2022 sampai dengan sekarang). Beliau pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (2014 sampai dengan Februari 2022) dan Direktur Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri (2010 sampai dengan 2014).

## Komite Kerja KSAP

07

### Amdi Very Dharma, Ak., MAcc., CA, QIA, CGCAE

#### Anggota Komite Kerja

Pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sebelumnya pernah menjabat Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola, Direktur Pengawasan Proyek Berbantuan Luar Negeri, Kepala Pusat Informasi Pengawasan, dan Direktur Pengawasan Bidang Perekonomian Lainnya.

08

### Chalimah Pujihastuti, SE, Ak., MAFIS

#### Anggota Komite Kerja

Saat ini menjabat sebagai Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan dan Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

09

### Doddy Setiadi, Ak., M.M., C.P.A

#### Anggota Komite Kerja

Saat ini menjabat sebagai Pejabat Fungsional Auditor Ahli Utama pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I pada Deputi Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur BPKP, Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan pada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP serta Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kota Depok.



## Tugas Komite Kerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tugas Komite Kerja adalah mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah. Mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 dimaksud, tugas Komite Kerja kemudian diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Komite Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.”

## Kelompok Kerja KSAP

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas KSAP, Komite Kerja KSAP membentuk Kelompok Kerja yang tata kerja serta keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja. Kelompok Kerja periode tahun 2024 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-06/K.1/KSAP/II/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang beranggotakan 32 orang dan berasal dari berbagai lembaga. Susunan keanggotaan kelompok kerja tersebut sebagai berikut:

### Ketua Kelompok Kerja

R. Wiwin Istanti, SE.Ak., M.Laws

### Wakil Ketua Kelompok Kerja

Fahma Sari Fatma, SE.Ak., M.S.E

### Anggota:

Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA

Muliani Sulya Fajarianti, SE,  
MEc.Dev, Cert. IPSAS, CGAE.

Lucia Widiarsanti, SE., M.Si., CFE., CA.,  
Cert. IPSAS.

Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA.,  
Cert. IPSAS.

Jamason Sinaga, Ak., MAP., CA., CRMP.

Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Cert. IPSAS.

Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST.,  
M.Ak., Cert. IPSAS.

Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak.

Prof.Dr.Ratna Wardhani,  
SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CGMA.,Cert. IPSAS.

Rahadian Widagdo, SST.Ak., M.Sc., CGAP.,  
Cert. IPSAS.

Didied Ary Setyanang, SST. Ak.,  
M.Prof. Acc.

Joko Tri Prasetyo, SST.Ak., M.AcctgFin.

Budiman, SST., SE., Ak., MBA.

Januarti Tiurmida, SE., MM.

I Putu Sukma Hendrawan., SE., MSM.,  
PFM., CPMA.

Kresia Ramadanty, SST., Ak., MBPM.,  
CAPM, CPMA.

Prof. Dr. Sylvia Veronica N.P. Siregar,  
SE., Ak., CA.

Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA.

Dr. Budi Mulyana, SE., M.Si., Cert. IPSAS.,  
CGAE., CPFM.

Awaludin Mashudi, SE., M.Ak., CA.

## Kelompok Kerja KSAP

Yan Rahadian S.E., Ak., M.S.Ak., CA., CSRS.

Agung Ariyanto S.E., Ak.

Dodok Dwi Handoko S.ST Ak., M.Sc.

Muh. Tunjung Nugroho SE., Ak., ME., CA.

Achmad Fauzi SE., M.Ak. Cert. IPSAS.

Judika Mariana Hutabarat, SE., MA.

Esti Dwi Arvina, S.I.P., M.B.A. Cert. IPSAS.

Ingelia Puspita, S.E., Ak., M.Com.

Wakhid Susilo, S.S.T., M.Acc.

Hazmi Muzakki, SE.

## Tugas Kelompok Kerja

Berdasarkan PP 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa “KSAP dapat membentuk pokja yang bertugas membahas topik-topik yang telah disetujui. Keanggotaan Pokja ini berasal dari berbagai instansi yang kompeten di bidangnya”.



## Kesekretariatan dan Pengelolaan Anggaran

Sesuai dengan Keppres Nomor 84 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “untuk melaksanakan tugasnya, KSAP dibantu oleh suatu sekretariat, yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Komite Konsultatif.” Tugas Kesekretariatan saat ini dilaksanakan oleh Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan yang berada pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hal ini mengacu pada PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa “Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemberian dukungan teknis terhadap pengembangan dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, melaksanakan koordinasi pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah serta pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.” Adapun susunan pengelola anggaran KSAP tahun 2024 adalah:

**Esti Dwi Arvina,**

Kepala Subdirektorat SAP selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja KSAP

**Achmad Fauzi,**

Kepala Seksi Fasilitasi KSAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja KSAP

**Hazmi Muzakki,**

Kepala Seksi Dukungan Pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan selaku Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar Satuan Kerja KSAP

**Satria Mahardika,**

Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja KSAP

**Eka Rizkia Nabila,**

Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja KSAP

## Kapitalisasi Pengeluaran (Belanja)

oleh: Joni Afandi (Anggota Kelompok Kerja KSAP)

Apa yang dimaksud dengan kapitalisasi? Sering kita mendengar istilah kapitalisasi aset. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan kapitalisasi itu sendiri. Tulisan berikut akan menjelaskan kapitalisasi dari sisi akuntansi dan tulisan ini merupakan pendapat pribadi semata.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) istilah kapitalisasi dimuat dalam PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, PSAP 14 Aset Tak Berwujud serta PSAP 16 Perjanjian Konsesi Jasa. Dalam PSAP 01, pengaturan kapitalisasi terkait dengan kebijakan kapitalisasi yang perlu diungkapkan entitas dalam Catatan atas Laporan Keuangannya.

Dalam PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, penggunaan istilah kapitalisasi mengatur tentang pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*), dimana pada paragraph 50 disebutkan bahwa kapitalisasi biaya harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti yang dimuat pada paragraf 49 (yaitu pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja) dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Selain itu dalam paragraf 51 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap disebutkan bahwa suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, kapitalisasi digunakan dalam pengaturan pengakuan mengenai biaya pinjaman. Disebutkan dalam paragraf 26 bahwa jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

# Pojok

## Literasi

Selain itu dalam paragraf 28 PSAP 08 disebutkan bahwa jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan. Selanjutnya dalam paragraf 30 bahwa apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Demikian juga dengan pengaturan dalam paragraf 31, 32 dan 33 yang mengatur mengenai biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Pengaitan kapitalisasi dengan biaya pinjaman, selain diatur dalam PSAP 08, juga diatur dalam PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, dimana biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dihitung berdasarkan biaya pinjaman dalam masa konstruksi atau perolehan aset.

Pengaturan kapitalisasi dalam PSAP 14 Aset Tak Berwujud (ATB) mengatur mengenai pengeluaran yang dapat dikapitalisasi dalam aktivitas pengembangan ATB yang diperoleh secara internal maupun pengaturan mengenai perolehan ATB yang dikapitalisasi sebagai perolehan aset tetap atau yang dikapitalisasi sebagai ATB itu sendiri. Termasuk dalam pengaturan kapitalisasi terkait ATB terkait dengan pengukuran setelah perolehan yang menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya atau pengeluaran yang meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas dan efisiensi sebagaimana diatur dalam paragraf 56 PSAP ATB.

Dalam PSAP 16 Perjanjian Konsesi Jasa, pengaturan kapitalisasi terkait dengan pengaturan biaya keuangan yang dapat dikapitalisasi dalam masa pembangunan aset konsesi jasa.

Bagaimana pengaturan di IPSAS terkait dengan kapitalisasi? IPSAS mengatur kapitalisasi dalam hubungannya dengan biaya pinjaman yang digunakan untuk perolehan aset tetap. IPSAS 45 *Property, Plant and Equipment*, menyatakan bahwa suatu aset tetap diakui jika dan hanya jika (a) terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa sehubungan dengan aset tetap tersebut akan mengalir ke entitas dan (b) aset tetap tersebut dapat diukur dengan andal.

Pada saat pengakuan awal, aset tetap yang memenuhi kriteria pengakuan diukur berdasarkan biaya perolehannya, kecuali bila aset tetap tersebut diperoleh melalui transaksi non-pertukaran yang diukur sebesar perkiraan biaya perolehan bawaan (*deemed cost*).

Perolehan aset tetap sendiri dapat berasal dari pembelian, pembangunan maupun pengembangan. Karena itu dapat juga dikatakan bahwa terkait dengan biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi merupakan salah satu komponen biaya perolehan aset tetap yang diperoleh dari Pembangunan.

**03**

**Produk KSAP  
dan Proses  
Penyusunan  
SAP**

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa “standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah dan disusun oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen yang terdiri dari para profesional. Agar komite dimaksud terjamin independensinya, komite harus dibentuk dengan suatu keputusan Presiden dan harus bekerja berdasarkan suatu due process. Selain itu, usul standar yang disusun oleh komite perlu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Bahan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan. Hasil penyempurnaan tersebut diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dan selanjutnya usul standar yang telah disempurnakan tersebut diajukan oleh Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam peraturan pemerintah.”

Sejak ditetapkan pertama kali pada tahun 2004, KSAP telah menyelesaikan penyusunan dua SAP (SAP Basis Kas menuju AkruaI dan SAP Basis AkruaI), 24 Buletin Teknis (Bultek), 4 Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP), Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan, serta Panduan SAP di Masa Pandemi *Covid-19*. Secara rinci produk KSAP terdiri dari:

### 1. Standar Akuntansi Pemerintahan

- a. SAP Basis Kas Menuju AkruaI yang ditetapkan dalam PP 24 Tahun 2005, yang terdiri dari 1 Kerangka Konseptual dan 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP);
- b. SAP Basis AkruaI yang ditetapkan dalam PP 71 Tahun 2010, yang terdiri dari 1 Kerangka Konseptual dan 12 PSAP;
- c. Revisi dan Penambahan PSAP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PP 71 Tahun 2010 dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang terdiri dari:

- PSAP 13 Akuntansi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
- PSAP 14 Akuntansi Aset Tak Berwujud
- PSAP 15 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
- PSAP 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi
- PSAP 17 Properti Investasi
- PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran
- PSAP 19 Pengaturan Bersama
- Revisi Kerangka Konseptual
- Revisi PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
- Revisi PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- Revisi PSAP 07 Aset Tetap
- Revisi PSAP 13 Penyajian Laporan Keuangan BLU
- Revisi PSAP 05 Akuntansi Persediaan

### 2. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (Bultek SAP)

Bultek SAP merupakan penjelasan teknis akuntansi terkait penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Sampai dengan tahun 2024, KSAP telah menerbitkan Bultek SAP yang terdiri dari:

- a. Bultek SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI sebanyak 14 Bultek
- b. Bultek SAP Berbasis AkruaI sebanyak 10 Bultek

### 3. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP)

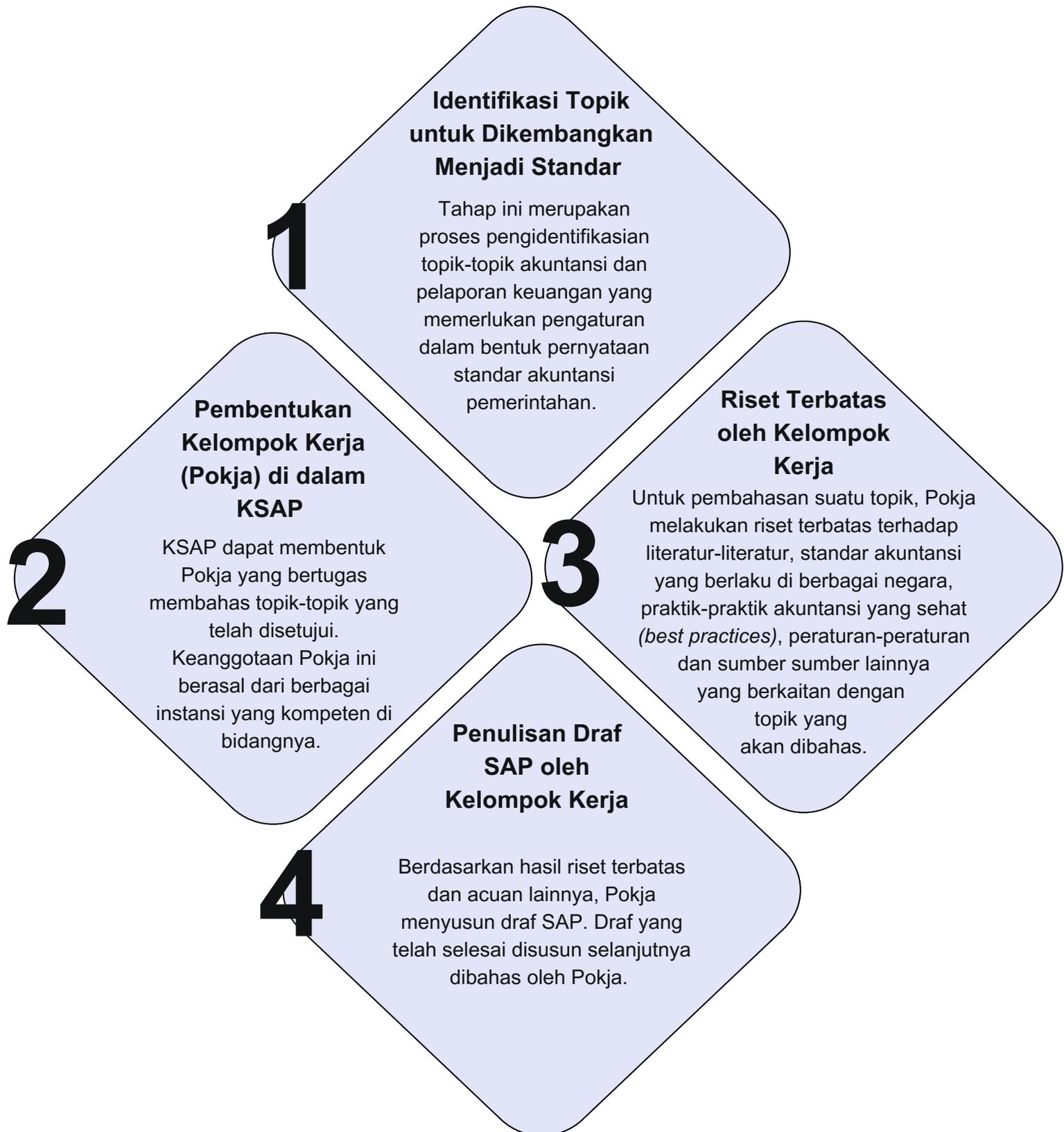
IPSAP adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Sampai dengan tahun 2024, KSAP telah menerbitkan 4 (empat) IPSAP SAP.

### 4. Bunga Rampai Studi Kasus Standar Akuntansi Pemerintahan

Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan merupakan kumpulan pertanyaan/kasus yang disampaikan oleh kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah beserta tanggapan yang dibuat oleh KSAP. Sampai dengan saat ini, KSAP telah menyusun 14 Edisi Bunga Rampai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2024.

### 5. Panduan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Masa Pandemi *Covid-19*

## Due Process Penyusunan Standar



## Due Process Penyusunan Standar

5

### Pembahasan Draf oleh Komite Kerja

Draf yang telah disusun oleh pokja dibahas oleh anggota Komite Kerja. Pembahasan diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar. Dengan pendekatan ini diharapkan draf tersebut menjadi standar akuntansi yang berkualitas. Pembahasan ini tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan-perubahan dari draf awal yang diusulkan oleh Pokja. Pada tahap ini, Komite Kerja juga melakukan diskusi dengan BPK untuk menyamakan persepsi.

### Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan

Komite Kerja berkonsultasi dengan Komite Konsultatif untuk pengambilan keputusan peluncuran draf publikasian SAP.

6

### Peluncuran Draf SAP (*Exposure Draft*)

KSAP melakukan peluncuran draf SAP dengan mengirimkan draf SAP kepada pemangku kepentingan, antara lain masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa, dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan.

7

### Dengar Pendapat Publik Terbatas (*Limited Hearings*) dan Dengar Pendapat Publik (*Public Hearings*)

Dengar pendapat dilakukan dua tahap yaitu dengar pendapat publik terbatas dan dengar pendapat publik. Dengar pendapat publik terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan dan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP untuk memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan draf publikasian. Dengar pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP. Tahapan ini dimaksudkan untuk meminta tanggapan masyarakat terhadap draf SAP.

8

### Pembahasan Tanggapan dan Masukan terhadap Draf SAP

KSAP melakukan pembahasan atas tanggapan/masukan yang diperoleh dari dengar pendapat terbatas, dengar pendapat publik dan masukan lainnya dari berbagai pihak untuk menyempurnakan draf SAP.

9

### Finalisasi Standar

Dalam rangka finalisasi draf SAP, KSAP memperhatikan pertimbangan dari BPK. Disamping itu, tahap ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi, konsistensi, koherensi maupun bahasa. Finalisasi setiap PSAP ditandai dengan penandatanganan draf PSAP oleh seluruh anggota KSAP.

10

## Materi dan Rujukan yang Digunakan dalam Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi:



PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang  
Standar Akuntansi Pemerintahan



Produk IFAC (*The International  
Federation of Accountant*)



Produk IASC/IASB (*The International  
Accounting Standards Committee/  
International Accounting Standard Board*)



Produk IMF  
(*International Monetary Fund*)



Ikatan Akuntan Indonesia

Produk IAI  
(Ikatan Akuntan Indonesia)



Produk FASB-USA (*Financial  
Accounting Standard Board-USA*)



Produk GASB-USA (*Governmental  
Accounting Standard Board-USA*)



Produk FASAB-USA (*The Federal  
Accounting Standards Advisory Board*)

Produk-produk lain yang dapat dijadikan rujukan

### Langkah penyusunan SAP Akrual dilakukan dengan cara:

- SAP Berbasis Akrual dikembangkan dari SAP PP 24/2005 dengan mengacu pada *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
- SAP Berbasis Akrual adalah SAP PP 24/2005 yang telah dikembangkan sesuai dengan basis akrual.
- Laporan Operasional – yang dalam SAP PP 24/2005 disebut dengan nama Laporan Kinerja Keuangan dan bersifat opsional – dalam SAP Berbasis Akrual menjadi salah satu PSAP untuk pelaporan atas pendapatan dari sumber daya ekonomi yang diperoleh dan beban untuk kegiatan pelayanan pemerintahan.
- Kerangka konseptual dalam SAP PP 24/2005 dimodifikasi dan diperbarui sehingga menjadi kerangka konseptual dari PSAP berbasis akrual.

Sejalan dengan tuntutan harmonisasi standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan praktik terbaik di dunia internasional sehingga kualitas pelaporan keuangan pemerintah dapat diperbandingkan dengan negara-negara lainnya, KSAP menyusun standar sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku di dunia internasional. KSAP menggunakan strategi adaptasi atas standar akuntansi sektor publik internasional (*International Public Sector Accounting Standards*). Penekanan untuk mengacu kepada produk IPSAS juga disampaikan oleh BPK melalui surat Nomor 62/S/IV-XV/12/2017 tanggal 20 Desember 2017, yaitu BPJ merekomendasikan untuk penyusunan 13 standar baru dengan mengacu pada standar IPSAS.

# Kontak Resmi KSAP



## Pengiriman Dokumen Fisik

**Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan**  
Gedung Prijadi Praptosuharjo III, Lantai 3  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta Pusat

## Email Resmi KSAP

[sekretariat.ksap@gmail.com](mailto:sekretariat.ksap@gmail.com)



**04**

**Capaian  
Kinerja KSAP  
Tahun 2024**

## Capaian Kinerja Tahun 2024

1

### Penyusunan Draf Standar dan Bunga Rampai Tahun 2024

#### Penyusunan Draf Standar Tahun 2024

<p><b>PMK PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dan 19 Pengaturan Bersama</b></p>	<p><b>Draf Final PSAP Siap RPMK</b></p>
<p><b>PMK 122 TAHUN 2024</b> Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran</p> <p><b>PMK 123 TAHUN 2024</b> Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 19 Pengaturan Bersama</p> <p>*Dua PSAP tersebut ditetapkan tanggal 31 Desember 2024</p>	<p>1. PSAP Agrikultur 2. PSAP Imbalan Kerja</p> <p><b>Draf Tahap Finalisasi Pasca Pertimbangan BPK</b></p> <p>1. PSAP Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi 2. PSAP Instrumen Keuangan 3. PSAP Instrumen Keuangan – Penyajian 4. PSAP Instrumen Keuangan – Pengungkapan</p>

#### Penyusunan Draf PSAP

Penyusunan Draf PSAP Baru	Penyusunan Draf PSAP Revisi
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSAP Sewa</li> <li>2. PSAP Pendapatan</li> <li>3. PSAP Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi</li> <li>4. PSAP Penurunan Nilai Aset Penghasil Kas</li> <li>5. PSAP Pengungkapan Informasi Keuangan Sektor Pemerintah Umum</li> <li>6. PSAP Penurunan Nilai Aset Non Penghasil Kas</li> <li>7. PSAP Imbalan Sosial</li> <li>8. PSAP Pengukuran</li> <li>9. PSAP Investasi pada Asosiasi dan Ventura Bersama</li> <li>10. PSAP Pengaruh Perubahan pada Mata Uang Asing</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi Kerangka Konseptual</li> <li>2. Revisi PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan</li> <li>3. Revisi PSAP 02 LRA Berbasis Kas</li> <li>4. Revisi PSAP 07 Aset Tetap</li> <li>5. Revisi PSAP 13 Penyajian LK BLU</li> <li>6. Revisi PSAP 05 Akuntansi Persediaan</li> </ol>

## Capaian Kinerja Tahun 2024

### Bunga Rampai Tahun 2024

Penyusunan Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan 2024 yang berisi kompilasi surat-surat jawaban KSAP atas konsultasi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Bunga Rampai Tahun 2024 dapat diunduh melalui:

#### **Bunga Rampai Tahun 2024**

Surat konsultasi pemangku kepentingan ke KSAP sebagaimana telah dibukukan dalam Bunga Rampai Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal
1	23 Januari 2024	S-06/K.1/KSAP/I/2024	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	Pendapat atas Penyusunan Perubahan Kebijakan Akuntansi
2	19 Februari 2024	S-11/K.1/KSAP/II/2024	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Penyajian Tanah Hak Kelola
3	12 Juni 2024	S-28/K.1/KSAP/VI/2024	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pendapat atas Perlakuan Akuntansi Terhadap Persediaan Bibit Tanaman dan Hewan Ternak Hasil Produksi
4	3 Juli 2024	S-37/K.1/KSAP/VII/2024	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunung Jati	Pendapat atas Konsultasi RSUD Gunung Jati Kota Cirebon (PSAP 01, 07 dan 10)
5	16 Juli 2024	S-41/K.1/KSAP/VII/2024	Kepala BPKAD	Kabupaten Bogor	Tanggapan Permohonan Pertimbangan atas Kebijakan Akuntansi Kemitraan dengan Pihak Ketiga

## Capaian Kinerja Tahun 2024

2

### Fasilitasi Permintaan Narasumber dari KSAP

Pada tahun 2024, anggota KSAP menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan di antaranya sebagai berikut:

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Anggota KSAP	Penyelenggara
1.	21 Februari 2024	Rapat Koordinasi dan Asistensi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Budi Mulyana	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
2.	29 Februari 2024	<i>Workshop</i> Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Joni Afandi	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3.	15 Maret 2024	Pembahasan Perlakuan Akuntansi Unit Usaha satker BLU	Joni Afandi	Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan
4.	19 Maret 2024	Pembahasan <i>Draft Action Plan</i> Audit BPK terhadap temuan Laporan Keuangan <i>Unaudited</i> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun Anggaran 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Joni Afandi</li> <li>Achmad Fauzi</li> </ul>	Biro Umum dan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5.	27 Maret 2024	Diskusi tentang rencana pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan	Dwi Martani	Kepala Direktorat Analisis Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI

## Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Anggota KSAP	Penyelenggara
6.	3 Mei 2024	Konsinyering Pembahasan Konsolidasi Laporan Keuangan Korporasi Publik	Dwi Martani	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7.	7 Mei 2024	Pembinaan <i>Online</i> Pemda Bulan Mei Tahun 2024	Agung Ariyanto	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
8.	13 Mei 2024	<i>In House Training</i> Analisis Laporan Keuangan BLU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Joni Afandi</li> <li>• Hazmi Muzakki</li> </ul>	Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan
9.	11 Juni 2024	Pembahasan Tinjau Ulang Juklak PNBPN dan Evaluasi Kebijakan PDDM	Rahadian Widagdo	Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan
10.	14 Juni 2024	FGD Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian dan Aset Tak Berwujud	Wakhid Susilo	Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian
11.	26 Juni 2024	Rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri	Achmad Fauzi	Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
12.	27 Juni 2024	Forum Konsolidasi BLU Kementerian Keuangan	Joni Afandi	Direktur Keuangan dan Umum LPDP
13.	9 Juli 2024	FGD Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah Timor Leste	Sumiyati	PKN STAN

## Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Anggota KSAP	Penyelenggara
14.	10 Juli 2024	FGD Penerapan PSAP 21 Agrikultur pada Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dwi Martani</li> <li>• Rahadian Widagdo</li> </ul>	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
15.	10 Juli 2024	Pembahasan terkait Properti Investasi dan Aset Konsesi Jasa dalam Kodefikasi Barang Milik Daerah	Didied Ary Setyanang	Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
16.	30 Juli 2024	KSAP Goes to Campus dan FGD SAP Tahun 2024 Universitas Tanjungpura Pontianak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumiyati</li> <li>• Rahmat Mulyono</li> <li>• Esti Dwi Arvina</li> </ul>	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
17.	13 Agustus 2024	Pembinaan Online Pemda bulan Agustus 2024	Dwi Martani	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
18.	5 September 2024	KSAP Goes to Campus dan FGD SAP Tahun 2024 Universitas Tadulako Palu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dwi Martani</li> <li>• Didied Ary Setyanang</li> </ul>	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
19.	9-11 September 2024	KSAP Goes to Campus dan FGD SAP Tahun 2024 Universitas Andalas Padang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yuniar Yanuar Rasyid</li> <li>• Hamdani</li> <li>• Fahma Sari Fatma</li> <li>• Esti Dwi Arvina</li> <li>• Joni Afandi</li> </ul>	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

## Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Anggota KSAP	Penyelenggara
20	26 September 2024	FGD Pedoman Penatausahaan Aset Tak Berwujud di Lingkungan Mahkamah Agung RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Joni Afandi</li> <li>• Achmad Fauzi</li> </ul>	Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
21.	11 Oktober 2024	Tindak Lanjut Rencana Implementasi Penerapan PSAK 117 Kontrak Asuransi kepada PT Taspen (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Joni Afandi</li> <li>• Achmad Fauzi</li> </ul>	Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran
22.	17 Oktober 2024	Kegiatan Penilaian Aset Untuk Pelaporan Keuangan Emiten Berdasarkan Perspektif Standar Akuntansi Pemerintah	Yan Rahadian	Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
23.	17 Oktober 2024	Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024	Didied Ary Setyanang	Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
23.	21 - 22 Oktober 2024	FGD Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Semester II Tahun 2024 Lingkup Provinsi Kalimantan Barat	Rahmat Mulyono	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat
24.	12 November 2024	FGD Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat melalui Penyajian dan Pengungkapan Informasi Kinerja Pemerintah sebagai Akuntabilitas Pencapaian Prestasi Kerja Penggunaan Anggaran	Dwi Martani	Auditorat Utama Keuangan Negara II BPK RI

## Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Anggota KSAP	Penyelenggara
25.	28 November 2024	Penelitian kolaborasi dengan topik penelitian "Valuasi dan Penyajian Aset Spektrum Frekuensi sebagai Potensi Sumber <i>Underlying Asset</i> Sukuk Negara"	I Putu Sukma Hendrawan	PKN STAN
26.	12 Desember 2024	Rapat Koordinasi dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Lingkup Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Joni Afandi</li> <li>• I Putu Sukma Hendrawan</li> </ul>	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
27.	16 Desember 2024	Kegiatan Sosialisasi Pengelola Akuntansi SKPKD pada Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2024	Rahadian Widagdo	BPKAD Pemerintah Kota Bekasi

## Capaian Kinerja Tahun 2024

3

### Pelaksanaan Fasilitas Kunjungan *Stakeholder*

Pada tahun 2024, KSAP menerima kunjungan dari stakeholder dalam rangka konsultasi atas permasalahan seputar standar akuntansi pemerintahan. Berikut daftar *stakeholder* yang berkunjung ke KSAP selama tahun 2024:

No	Tanggal	Instansi	Keperluan
1.	26 Maret 2024	Kementerian Agama	Konsultasi Laporan Keuangan dan SAP
2.	27 Maret 2024	Kabupaten Sumba Timur	Konsultasi terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2020
3.	30 Mei 2024	Kabupaten Gorontalo	Konsultasi Properti Investasi dan Penyajian Belanja Modal serta Dana BOS
4.	7 Juni 2024	Kementerian Pertanian, BSIP	Konsultasi Aset Tak Berwujud
5.	12 Juni 2024	Kota Tarakan	Konsultasi Laporan Keuangan BLU Daerah dan SAP
6.	2 Juli 2024	Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati	Konsultasi atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 atas Sewa dan Hibah
7.	23 Agustus 2024	Kabupaten Musibanyuasin	Konsultasi atas Barang yang Diserahkan
8.	4 Oktober 2024	Kota Semarang	Konsultasi Bultek 14,16 dan 20
9.	23 Oktober 2024	Kota Tarakan	Konsultasi dan koordinasi SAP dan Kebijakan Akuntansi
10.	28 Oktober 2024	Kabupaten Lampung Barat	Konsultasi terkait Properti Investasi

**Capaian Kinerja Tahun 2024**

No	Tanggal	Instansi	Keperluan
11.	29 Oktober 2024	Kota Bekasi	Konsultasi terkait SAP dan Kebijakan Akuntansi
12.	29 Oktober 2024	DKI Jakarta	Konsultasi SAP terkait Denda Pajak
13.	20 November 2024	Provinsi NTT	Konsultasi terkait SAP dan Kebijakan Akuntansi
14.	2 Desember 2024	Provinsi Barito Kuala	Konsultasi terkait SAP dan Kebijakan Akuntansi
15.	5 Desember 2024	Kota Bekasi	Konsultasi terkait Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Akuntansi SKPD

## Capaian Kinerja Tahun 2024

4

### Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Internal KSAP

Pada tahun 2024, KSAP mengadakan beberapa kegiatan baik dalam rangka mendukung penyusunan maupun implementasi SAP kepada para stakeholder. Berikut daftar kegiatan yang telah di laksanakan KSAP selama tahun 2024:

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Pokok Kegiatan
1.	23 Januari 2024	FGD Tim PSAP BLU	Pembahasan Revisi PSAP 13 Penyusunan Laporan Keuangan BLU Kementerian Keuangan
2.	19 Februari 2024	FGD dengan BPK	Diskusi Draf Pertimbangan BPK atas tiga Draf PSAP Instrumen Keuangan
3.	30 Juli 2024	KSAP Goes to Campus - Universitas Tanjungpura	Sejarah Penyusunan SAP dan Review Isi dari Masing-masing SAP
4.	30 Juli 2024	FGD dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat	PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan dan PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
5.	5 Agustus 2024	FGD Tim PSAP Aset Tetap	Pembahasan Draf Revisi PSAP 07 Aset Tetap
6.	7 Agustus 2024	FGD Tim Kerangka Konseptual dan Pengukuran	Pembahasan Draf Revisi Kerangka Konseptual dan Draf PSAP Pengukuran
7	5 September 2024	KSAP Goes to Campus - Universitas Tadulako	Sejarah Penyusunan SAP dan Pembahasan PSAP 16 Konsesi Jasa serta PSAP 17 Properti Investasi
9.	10 September 2024	KSAP Goes to Campus - Universitas Andalas	Sejarah Penyusunan SAP dan Review Isi dari Masing-masing SAP

**Capaian Kinerja Tahun 2024**

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Pokok Kegiatan
10.	11 September 2024	FGD dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Barat	Pembahasan PSAP 07, PSAP 10 dan PSAP 17
11.	1 November 2024	FGD Tim PSAP Laporan Realisasi Anggaran	Diskusi Revisi Draf PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

## Capaian Kinerja Tahun 2024

5

### Fasilitasi Kegiatan Sertifikasi IPSAS

Pada tahun 2024, KSAP memfasilitasi kegiatan sertifikasi IPSAS bagi beberapa anggota KSAP. Berikut adalah beberapa anggota KSAP yang telah lulus sertifikasi IPSAS:

No	Nama	Jabatan
1.	Fahma Sari Fatma	Wakil Ketua Kelompok Kerja KSAP
2.	Budiman	Anggota Kelompok Kerja KSAP
3.	Esti Dwi Arvina	Anggota Kelompok Kerja KSAP
4.	Budi Mulyana	Anggota Kelompok Kerja KSAP
5.	Achmad Fauzi	Anggota Kelompok Kerja KSAP
6.	Yan Rahadian	Anggota Kelompok Kerja KSAP
7.	Didied Ary Setyanang	Anggota Kelompok Kerja KSAP
8.	Agung Ariyanto	Anggota Kelompok Kerja KSAP
9.	I Putu Sukma Hendrawan	Anggota Kelompok Kerja KSAP
10.	Ilham Akbar	Anggota Kelompok Kerja KSAP

## Capaian Kinerja Tahun 2024

No	PSAP	Rencana Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
1.	Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran	Sosialisasi	Penetapan (PMK 122/2024)
2.	Pengaturan Bersama	Sosialisasi	Penetapan (PMK 123/2024)
3.	Imbalan Kerja	Sosialisasi	Draf Final Siap RPMK
4.	Agrikultur	Sosialisasi	Draf Final Siap RPMK
5.	Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi	Sosialisasi	Draf Final Siap RPMK
6.	Instrumen Keuangan - Penyajian	Proses Penetapan	Ditunda
7.	Instrumen Keuangan - Pengakuan dan Penyajian	Proses Penetapan	Ditunda
9.	Instrumen Keuangan - Pengungkapan	Proses Penetapan	Ditunda
10.	Sewa	Finalisasi Draf Pasca Pertimbangan BPK	Finalisasi Draf Pasca Pertimbangan BPK
11.	Pendapatan ( <i>Revenue</i> )	Draf Publikasian sebelum <i>Limited Hearing</i>	Proses <i>Drafting</i>
12.	Penurunan Nilai Aset yang tidak Menghasilkan Kas	Draf Publikasian sebelum <i>Limited Hearing</i>	Proses <i>Drafting</i>
13.	Penurunan Nilai Aset yang Menghasilkan Kas	Draf Publikasian sebelum <i>Limited Hearing</i>	Proses <i>Drafting</i>

## Capaian Kinerja Tahun 2024

No	PSAP	Rencana Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
14.	Pengungkapan Informasi Sektor Pemerintah Umum	Draf Publikasian sebelum <i>Limited Hearing</i>	Proses <i>Drafting</i>
15.	Pengungkapan Informasi Pihak Berelasi	Draf Publikasian sebelum <i>Limited Hearing</i>	Proses <i>Drafting</i>
16.	Biaya Pinjaman	Draf Publikasian sebelum <i>Limited Hearing</i>	Proses <i>Drafting</i>
17.	Investasi pada Entitas Lain dan Ventura Bersama	Draf Publikasian sebelum <i>Limited Hearing</i>	Proses <i>Drafting</i>
18.	Imbalan Sosial	Draf Publikasian sebelum <i>Limited Hearing</i>	Proses <i>Drafting</i>
19.	Pengukuran	Draf Publikasian sebelum <i>Limited Hearing</i>	Proses <i>Drafting</i>
20.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisi Kerangka Konseptual</li> <li>• Revisi PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas</li> <li>• Revisi PSAP 05 Persediaan</li> <li>• Revisi PSAP 07 Aset Tetap</li> <li>• Revisi PSAP 13 Penyajian Laporan Keuangan BLU</li> </ul>	Draf Publikasian sebelum <i>Limited Hearing</i>	Proses <i>Drafting</i>

**05**

**Rencana  
Kerja Tahun  
2025**

## Rencana Kerja Tahun 2025

1

### Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan

#### Draf PSAP Siap RPMK

No	Draf PSAP	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	PSAP Imbalan Kerja	Pembahasan internal dan unit terkait	Proses Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM	Penetapan dan Pengundangan RPMK	Publikasi
2.	PSAP Agrikultur	Pembahasan internal dan unit terkait	Proses Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM	Penetapan dan Pengundangan RPMK	Publikasi

#### Penyusunan Draf Revisi PSAP

No	Draf PSAP	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Revisi Kerangka Konseptual	<i>Drafting</i>		<i>Limited/Public Hearing</i>	Pembahasan Pasca LH/PH
2.	Revisi PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan	<i>Drafting</i>			<i>Limited/Public Hearing</i>
3.	Revisi PSAP 02 LRA Berbasis Kas	<i>Drafting</i>			<i>Limited/Public Hearing</i>
4.	Revisi PSAP 07 Aset Tetap	<i>Drafting</i>			<i>Limited/Public Hearing</i>
5.	Revisi PSAP 13 Penyajian LK BLU	<i>Drafting</i>		<i>Limited/Public Hearing</i>	Pembahasan Pasca LH/PH
6.	Revisi PSAP 05 Akuntansi Persediaan	<i>Drafting</i>		<i>Limited/Public Hearing</i>	Pembahasan Pasca LH/PH

## Rencana Kerja Tahun 2025

### Penyusunan Draf PSAP Baru

No	Draf PSAP	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	PSAP Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi	Finalisasi Draf Pasca Pertimbangan BPK		Otentifikasi	Proses Penetapan RPMK
2.	PSAP Instrumen Keuangan	<p style="text-align: center;"><i>On Hold</i> (Menunggu Penyelesaian PSAP-PSAP terkait)</p>			
3.	PSAP Instrumen Keuangan – Penyajian				
4.	PSAP Instrumen Keuangan – Pengungkapan				
5.	PSAP Sewa	<i>Drafting</i>	Permintaan Pertimbangan BPK	Finalisasi Pasca Pertimbangan	
6.	PSAP Pendapatan	<i>Drafting</i>			
7.	PSAP Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi	<i>Drafting</i>		<i>Limited/Public Hearing</i>	Pembahasan Pasca LH/PH
8.	PSAP Penurunan Nilai Aset Penghasil Kas	<i>Drafting</i>			
9.	PSAP Pengungkapan Informasi Keuangan Sektor Pemerintah Umum	<i>Drafting</i>			
10.	PSAP Penurunan Nilai Aset Non Penghasil Kas	<i>Drafting</i>			

## Rencana Kerja Tahun 2025

No	Draf PSAP	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
11.	PSAP Imbalan Sosial	<i>Drafting</i>		<i>Limited/Public Hearing</i>	Pembahasan Pasca LH/PH
12.	PSAP Pengukuran	<i>Drafting dan FGD Lanjutan</i>			<i>Limited/Public Hearing</i>
13.	PSAP Investasi pada Asosiasi dan Ventura Bersama	<i>Drafting</i>		<i>Limited/Public Hearing</i>	Pembahasan Pasca LH/PH
14.	PSAP Pengaruh Perubahan pada Mata Uang Asing	<i>Drafting</i>		<i>Limited/Public Hearing</i>	Pembahasan Pasca LH/PH
15.	PSAP Biaya Pinjaman	<i>Drafting</i>		<i>Limited/Public Hearing</i>	Pembahasan Pasca LH/PH

## Rencana Kerja Tahun 2025

2

### Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029

Saat ini KSAP sedang melakukan proses penyusunan Rencana Strategis KSAP tahun 2025-2029. Rencana strategis KSAP tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi KSAP sebagai mana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Keppres 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana terakhir dirubah melalui Keppres 28 Tahun 2017 serta arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan KSAP.

Rencana strategis KSAP tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana strategis KSAP harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

#### Renstra KSAP Tahun 2025-2029



# Perubahan Keputusan Presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

**Kurun Waktu  
2004-2024**



**06**

**Mengenal  
PSAP Baru**

## PSAP 18: Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 18: Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran, terdiri dari paragraf 01 sampai dengan paragraf 115 dilampiri dengan Dasar Kesimpulan dan Panduan Implementasi.

### Tujuan

Tujuan dari pernyataan standar ini **untuk mengatur pelaporan keuangan atas pendapatan yang berasal dari transaksi nonpertukaran.**

### Tanggal Efektif

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran **mulai tahun anggaran 2026.**

Jika entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode yang dimulai sebelum tahun anggaran 2026, entitas dipersyaratkan untuk mengungkapkannya.

### Ruang Lingkup

Entitas pemerintah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan menerapkan pernyataan standar ini untuk akuntansi atas pendapatan dari transaksi nonpertukaran.

**Pendapatan pemerintah pada umumnya berasal dari transaksi nonpertukaran seperti:**

- Perpajakan; dan
- Transfer (kas dan nonkas) meliputi: transfer antarentitas pemerintahan, hibah, penghapusan utang, denda, bantuan, sumbangan dan hadiah, dan selisih antara harga transaksi (hasil pinjaman) dengan nilai wajar pinjaman atas pinjaman lunak.

### PMK

**PMK Nomor 122 Tahun 2024** tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis AkruaI Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran

## PSAP 19: Pengaturan Bersama

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 19: Pengaturan Bersama, terdiri dari paragraf 01 sampai dengan paragraf 38 dilampiri dengan Dasar Kesimpulan, Panduan Implementasi, dan Contoh Ilustrasi.

### Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah **mengatur prinsip pelaporan keuangan entitas pemerintah yang memiliki kepentingan dalam pengaturan yang dikendalikan bersama.**

Untuk mencapai tujuan dalam paragraf 01, Pernyataan Standar ini mendefinisikan pengendalian bersama (*joint control*) dan mensyaratkan entitas pemerintah yang merupakan pihak dalam pengaturan bersama untuk menentukan jenis pengaturan bersama dengan menilai hak dan kewajibannya serta mencatat hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan jenis pengaturan bersama.

### Ruang Lingkup

Pernyataan Standar ini berlaku untuk **setiap entitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara/daerah, yang merupakan pihak dalam pengaturan bersama.**

Pernyataan Standar ini berlaku untuk pengaturan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama. Pengendalian bersama dalam standar ini mensyaratkan setidaknya-tidaknya entitas pemerintah merupakan salah satu pihak dalam pengaturan bersama.

### Tanggal Efektif

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran **mulai Tahun Anggaran 2026.**

### PMK

**PMK Nomor 123 Tahun 2024** tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akruai Nomor 19 Pengaturan Bersama

## Serial ANW: Prinsip Penerapan pada Sistem Akuntansi Nilai Wajar

### 3 Serangkai yang Pertama

Ringkasan riset Dr. Jan Hoesada (Anggota Komite Kerja KSAP)

#### PENDAHULUAN

Makalah disusun sebagai bahan baku Peraturan Menteri Keuangan, Permendagri, Perda Sistem Akuntansi pemerintahan berbasis Akuntansi Nilai Wajar (ANW) di masa yang akan datang, mungkin pada tahun 2026/2027, merupakan tiga serangkai makalah tentang Prinsip Penerapan dalam Sistem ANW, Kendali-Internal Akuntansi Pemerintahan dan makalah Audit Kecurangan Informasi LK berbasis ANW.

Makalah ini adalah tentang prinsip penerapan SAK/SAP yang diterapkan secara kumulatif, bukan tentang prinsip akuntansi c.q. standar akuntansi. Prinsip penerapan ANW mencakupi Prinsip Satu-Lawan-Satu (*The One-to-One Principle*), Prinsip Mempertemukan (*The Matching Principle*), Prinsip Larangan Harga-Tetapan Sendiri, Prinsip Mendekati Kebenaran (*The Truing-up Principle*) dan Prinsip Atribut Campuran (*Mix Attribute Principle*).

Dokumen berjudul *Principles for the Application of Fair Value Accounting, White Paper Number Two*, sumber *Center for Excellence in Accounting & Security Analysis Columbia Business School*, *the Center for Excellence in Accounting and Security Analysis*, vide <http://www.gsb.columbia.edu/ceasa>, antara lain mengungkapkan berbagai kaidah penerapan standar akuntansi.

Kaidah penerapan SAP sebaiknya diposisikan sebagai bagian awal setiap PMK Pedoman Sistem Akuntansi Kepemerintahan NKRI.

IFRS/IPSAS menyatakan bahwa nilai-wajar adalah harga-diterima saat melakukan penjualan aset atau harga-dibayar tatkala pelunasan utang dalam transaksi wajar, lazim, berulang antar pelaku- ekonomi nir-hubungan-istimewa dalam mekanisme pasar-bebas, pada tanggal transaksi cq tanggal pengukuran-akuntansi untuk transaksi-tersebut. (*"Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date."*).

Prinsip ANW adalah bahwa harga pasar pada pasar-likuid disebut harga-pasar cuaca-normal (*“fair weather” prices*), bukan harga-pasar saat pasar-sedang di bawah-tekanan situasi luar-biasa, bukan suatu transaksi-khusus yang tak-mewakili harga pasar-bebas, misalnya penjual butuh tunai segera. Nilai bagi pemangku kepentingan atas LK setara nilai-dalam-penggunaan (*value in use*) pemangku-kepentingan, bukan nilai-dalam-penggunaan bagi entitas LK sendiri. Harga-pasar tak-sama dengan nilai-kini (*present value*), perubahan harga-pasar tak sama dengan perubahan nilai bagi pemangku-kepentingan.

### LKPP/LKPD NKRI BERBASIS ANW UNTUK SIAPA ?

- DPR/DPRD yang biasa berfokus pada pertanggung-jawaban APBN/D berbasis nilai-historis versi LRA Auditan, mendapat informasi komponen LK yang lain berbasis nilai wajar, makin searah/sejalan dengan LAKIP/LKjPP.
- Kabinet cq pada pejabat K/L menggunakan informasi LK berbasis ANW dalam pelaksanaan tupoksi masing-masing, memperbaiki informasi CALK tentang kinerja K/L terhapus atau terabaikan oleh informasi nilai-wajar. Sebaliknya terdapat keuntungan kenaikan ekuitas-bersih dalam LKPP karena ANW diterapkan kepada aset-tetap di neraca, menggambarkan nilai-kini representatif-zaman dan meningkatkan daya-berutang negara.
- Para ekonom, kritikus, cerdik-cendakia dan rakyat NKRI, menggunakan informasi LK berbasis ANW untuk analisis dan pembuatan masukan konstruktif bagi kabinet.
- Lembaga penyandang dana seperti IMF, WB dan lain-lain menggunakan informasi LK berbasis ANW dalam rencana-bantuan bila terjadi krisis-keuangan NKRI.
- Konsep Entitas (*entity concept*) diunggulkan IFRS/IPSAS ketimbang konsep-kepemilikan (*proprietorship concept*), memperhatikan pemangku-kepentingan atas LK berbasis ANW, di dalamnya telah termaktub aspirasi rakyat-banyak sebagai pemilik NKRI.

Akuntansi nilai wajar untuk entitas bukan lembaga-keuangan, antara lain entitas pemerintahan, adalah tentang akuntansi aset dan liabilitas terkait kegiatan-pembiayaan (financing)

### PERTIMBANGAN MENGGANTI PP 71/2010 ANH MENJADI SEBUAH PP ANW PADA TAHUN 2026

**Pertimbangan penggunaan akuntansi nilai-wajar yang bermuara pada LK berbasis nilai-wajar pemerintahan NKRI adalah**

1. Administrasi-keuangan negara untukrealisasi APBN dan LRA pada SAP berbasis nilai-historis, bertujuan untuk pertanggung-jawaban keuangan negara di hadapan DPR tidak menghalangi penerapan akuntansi dan LK berbasis nilai wajar.
2. Pengguna LK, antara lain DPR dan kabinet, dipastikan membergunakan informasi nilai-wajar untuk pengambilan keputusan atau bertransaksi dengan pihak luar entitas LK antara lain pasar modal untuk instrumen-utang negara dan lembaga/negara pemberi-pinjaman di muka bumi kepada NKRI pada umumnya menggunakan sudut pandang nilai-kini.

3. Nilai wajar menggunakan “nilai-keluar” (exit value), yaitu harga-pelepasan diterima pemilik aset, atau biaya harus dikeluarkan atau nilai-wajar aset yang diserahkan untuk pembebasan/pelunasan suatu liabilitas, tanpa peduli dampaknya pada rumpun ekuitas atau aset-bersih.
4. Peringkat transparansi dan akuntabilitas keuangan-negara di mata-internasional meningkat-signifikan, terjadi peningkatan kelayakan atau daya-utang negara NKRI kepada negara-lain dan/atau kepada lembaga keuangan internasional seperti WB dan IMF, karena LKPP/LKPD NKRI tersesuai dengan gerakan akuntansi nilai-wajar di muka bumi, sejalan dengan pembentukan SAK/SAP versi IFRS dan IPSAS.
5. BPK sebagai petugas-pertimbangan setiap SAP baru/diperbarui, berpendapat bahwa ANW Pemerintahan NKRI adalah lebih-baik bagi negara, ketimbang SAP ber-azas nilai-historis versi PP 71/2010. Akuntansi nilai historis menggambarkan kinerja-keuangan dan akibatnya pada ekuitas, akuntansi nilai wajar menggambarkan nilai-wajar neraca tanpa peduli dampaknya pada laporan kinerja. Laporan kinerja akuntansi-nilai wajar pemerintahan tak dapat di-baca atau dikaitkan dengan LAKIP , namun lebih mendukung dan lebih menghampiri LAKIP.

### TENTANG INFORMASI HARGA PASAR

Terdapat informasi harga-pasar yang dapat

1. dikuotasi langsung sebagai nilai-wajar;
2. terdapat berbagai kondisi pasar aktif, kurang aktif dan pasar-mati yang belum tentu memberi informasi nilai-wajar yang dapat dirujuk;
3. terdapat suatu obyek/unit aset/liabilitas dalam neraca yang memiliki beberapa pasar, memiliki beberapa harga-pasar;
4. terdapat berbagai obyek /unit aset/liabilitas dalam neraca nir-harga pasar;
5. terdapat informasi harga dari pasar-pasar lain yang dapat di-referensi dalam menentukan nilai-wajar dan terdapat berbagai obyek nir-harga pasar dengan nilai-wajar berhampiran-estimasi untuk pelaporan LK.

### PRINSIP PENERAPAN AKUNTANSI NILAI WAJAR PADA LKPP/LKPD

Bila KSAP memutuskan mengganti PP 71/2010 berbasis Akuntansi Nilai Historis dengan PP baru berbasis Akuntansi Nilai Wajar versi IPSAS , PMK Pedoman Akuntansi diperbarui dan memperhatikan berbagai prinsip-penerapan SAP ANW sebagai berikut.

#### 1. Prinsip Satu-Lawan-Satu (*The One-to-One Principle*)

Bila pembaca LK tergantung hanya pada info nilai-wajar, prinsip satu lawan satu (*The one-to-one principle*), menyatakan bahwa apabila prinsip-akuntansi diutamakan, maka prinsip lain diluar dunia-akuntansi wajib di abaikan sebagai prinsip yang tak-memuaskan atau prinsip yang diperdebatkan (*moot*), sebagai misal; pada dunia-perdagangan, istilahharga-keluar (*exit price*) digunakan entitas LK untuk transaksi penjualan-nya dengan pelanggan/pembeli, istilah harga-masuk (*input price*) perdagangan adalah harga-kesepakatan entitas LK sebagai pembeli dengan penjual, tak digunakan dalam berakuntansi.

Prinsip Satu-Lawan-Satu (The One-to-One Principle) menyatakan bahwa pelaporan LK berbasis akuntansi nilai wajar dibutuhkan para pengguna yang sehari-hari berurusan dengan nilai-wajar dan atau membutuhkan informasi nilai wajar untuk pengambilan keputusan sehari-hari, misalnya para pedagang komoditas, pedagang-sekuritas pasar-uang dan pasar-modal.

Pada entitas produksi komersial pemerintahan, bila ada, akuntansi-nilai-wajar tidak dimaksud digunakan untuk persediaan bahan-baku, bahan-pembantu atau setengah-jadi yang akan diolah menjadi barang-jadi dalam proses kombinasi dengan berbagai input-lain, menjadi barang-jadi bernilai-tambah (value added), bila tertengarai pelanggan atau pasar menjadi nilai-pasar atau nilai-jual yang seyogyanya (seharusnya) lebih besar dibanding akumulasi seluruh biaya input dan proses-produksi.

Entitas produksi menikmati:

- a. selisih harga-jual sesuai harga-pasar bebas vs harga pokok produksi, termasuk
- b. selisih harga-jual vs harga-jual pesaing, bila produk di nilai istimewa oleh pasar (diferensiasi produk).

Pada entitas perbankan sebagai entitas-pemerintahan, bila ada:

- a. deposito/tabungan adalah input berbeban bunga-deposito,
- b. kredit adalah output berbeban bunga-kredit bagi para peminjam,
- c. Untuk uang berjumlah sama, beban deposito biasa lebih rendah dari bunga-kredit, nilai-tambah proses-bisnis perbankan tercipta karena uang-tabungan (input perbankan) terkonversi menjadi kredit (output perbankan) sebagai input-kewirausahaan debitur-bank disamping mesin, bahan-baku, TK.

## 2. Prinsip Mempertemukan (*The Matching Principle*)

Prinsip Mempertemukan adalah pemaduan (*matching*) nan-serasi seluruh aset dan seluruh liabilitas dalam sebuah perencanaan entitas LK bertujuan mencapai hasil tertentu, antara lain:

- a. laba pada entitas komersial,
- b. pencapaian sasaran tertentu entitas nir-laba misalnya pada entitas pemerintahan, misalnya konversi utang-negara menjadi prasarana, yang bertujuan peningkatan prasarana menyebabkan pertumbuhan PDB, basis pajak dan kemampuan pembayaran kembali utang-negara.

Nilai sinergian tercipta dari kombinasi/kerjasama aset dan liabilitas dalam nilai-wajar masing-masing pada neraca di LKPP/LKPD sesuai strategi dan sasaran pemerintahan, sebagai misal kombinasi prasarana jalan-raya dengan prasarana pelabuhan udara/laut meningkatkan volume-perdagangan & bisnis, meningkatkan PDB.

**3. Prinsip Larangan Harga-Tetapan Sendiri**

Prinsip Larangan Harga-Tetapan Sendiri sebagai bahan/input pada hampiran berbasis model (mark to model), antara lain asumsi/pengandaian harga-pasar input , cuaca cq curah-hujan dan estimasi panen, asumsi pasar-lesu atau bergairah, dan asumsi rekayasa-internal yang lain.

Hati-hati akan gelembung-harga semasa (bubble price) karena situasi lingkungan tidak-normal, harga-umum berlaku yang bukan nilai-wajar, hati-hati dengan penggunaan model kurang-tepat pada hampiran mark-to-model, karena berpeluang memberi info nilai-wajar nan-keliru.

**4. Prinsip Mendekati Kebenaran (*The Truing-up Principle*)**

Akuntansi nilai wajar selalu berupaya mendekati kenyataan/kondisi pada tanggal LK, dengan proses rekonsiliasi dan penyesuaian-akuntansi , biasa dilakukan pada tanggal pelaporan LK, antara lain dengan membandingkan jumlah tercatat dengan jumlah aktual setelah tanggal neraca.

**5. Prinsip Atribut Campuran (*Mix Attribute Principle*)**

Pada model beratribut campuran (*mix attribut*), sesuai kebutuhan optimalisasi kualitas informasi akuntansi/LK, sebuah aset/liabilitas dinilai pada nilai-historis dan/atau nilai-wajar ganti-berganti (1) sesuai sifat/bentuk/jenis aset/liabilitas dan (2) sesuai kondisi-situasi, misalnya nilai aktual saat-perolehan diikuti nilai-wajar tanggal LK, peristiwa nilai-historis turun nilai , peristiwa nilai-wajar turun-nilai, peristiwa awal-baru bagi penerapan akuntansi nilai-wajar (*fresh start accounting*), transaksi donasi diberikan/diterima, transaksi barter aset non-keuangan, penggunaan nilai historis untuk menghitung beda harga-pokok vs harga-jual, nilai-wajar instrumen PM merujuk-pasar (*mark to market*), revaluasi-berkala BMN sesuai PMK, untung belum realisasi/telah realisasi pada Laporan Kinerja Keuangan pemerintahan, penerapan prinsip layak-temu (proper matching) antara nilai-wajar pendapatan vs nilai-historis beban, masalah-lapangan penentuan nilai-realisasi-bersih persediaan pada tanggal LK , metode hapus-buku/*write off* dan turun-nilai-buku/*write down* tanggal neraca, peristiwa perubahan nilai-pasar setelah-tanggal neraca, penerapan akuntansi-penurunan-nilai (*impairment accounting*), untung/rugi terealisasi/ ditahan atas perubahan nilai wajar (*unrealized gain*), nilai wajar aset keuangan karena perubahan nilai-tukar antar mata-uang digunakan pada LK (functional currency) vs mata-uang valas untuk pos-neraca simpanan, utang, piutang, klaim dalam valas, pada suatu rumpun aset/liabilitas pada suatu tanggal LK, pada umumnya (1) sebagian pengakuan awal perolehan berbasis nilai/harga-aktual kesepakatan perdata pembeli-penjual, (2) sebagian lagi pengakuan awal menggunakan nilai-wajar, dan (3) nilai-wajar praktis digunakan sedapat-dapatnya pada tanggal neraca, bertujuan agar LK berbasis-nilai wajar.

Sekadar catatan samping, pada sektor privat, prestasi nyata manajemen cq kinerja produksi/penjualan aktual cq kinerja pendapatan-akuntansi versi akuntansi-nilai-historis pudar-sinarnya, karena hilang-rekam-jejak-historis ketika masuk dalam neraca berbasis nilai-wajar, pertumbuhan ekuitas-bersih tak lagi menggambarkan ke digdayaan manajemen, karena merupakan saldo-penetoannilai wajar-aset di kurang nilai-wajar liabilitas.

Pada sektor privat, prestasi-nyata/aktual manajemen di bidang pengembangan produk/jasa utama, pasar-utama, pelanggan-utama, serta berbagai kebijakan keuangan, produksi, pilihan strategi pemasaran cq segmentasi pasar/pelanggan, pemosisian dan pemilihan target pelanggan untuk dilayani, strategi teknologi dan SDM, kinerja inovasi, pilihan strategi bersaing dan peningkatan daya-saing, ekuitas-merek (*brand equity*).

Karena hasil/*income* digambarkan oleh perubahan neraca ANW, berbagai “kehilangan” informasi serupa di atas karena penggunaan basis akuntansi nilai-wajar terjadi pula pada pemerintahan, sehingga LAKIP makin berperan penting mendampingi era-baru LK Pemerintahan Berbasis ANW.

### **FITUR AKUNTANSI NILAI WAJAR**

Fitur ANW atau karakteristik catatan-akuntansi dan LK berkualitas tinggi adalah sebagai berikut.

- Sistem akuntansi menghasilkan dua-nilai akhir (*2 bottom line*) Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Ekuitas pada Neraca.
  - Neraca adalah basis-utama pelaporan LK
- a. Neraca adalah sebuah nilai akuntansi nan-paripurna, mencakupi seluruh tujuan kegiatan penilaian nilai-wajar. Nilai wajar adalah nilai-likuidasian entitas tanggal neraca.
  - b. Hasil (*earnings*) sebagai perubahan nilai-entitas, bukan informasi hasil di masa-depan, tidak menginformasikan nilai, sekedar menginformasikan guncangan-berkala nilai-entitas dan risiko, karena itu tak-jadi soal apabila LK tak ber Laporan Kinerja-Keuangan, karena informasi termaktub dalam neraca sudah lengkap.
    - Harga-harga tersaji di neraca di sebut nilai-buku, di mana nisbah harga vs nilai-buku (*price to book value ratio*) adalah 1.
    - Sebagai guncangan tak-menentu, nisbah harga vs penghasilan (P/E ratio) bukan indikasi pertumbuhan penghasilan.

### **FITUR IDEAL AKUNTANSI NILAI HISTORIS**

Sekadar sebagai kelengkapan dan perbandingan, fitur ideal ANH adalah sebagai berikut.

- ANH melaporkan kenyataan pelaksanaan-kegiatan berbasis rencana, menggambarkan beda/penyimpangan proses manajemen, hasil-diharapkan dengan kenyataan raihan-hasil dan arus-kas dengan informasi realisasi vs rencana, sebagai dasar aksi-koreksi kegiatan dan manajemen arus-kas masa yang-akan-datang.
- Laporan kinerja keuangan versi ANH lebih menggambarkan kinerja manajemen. Analist ekuitas dapat mengukur kinerja-sejati manajemen (lebih murni) sebagai basis imbalan-kerja diluar perubahan-ekuitas karena perubahan lingkungan-eksternal.
- Pengutamaan konsep penghasilan (*income concept*) menyebabkan laporan-neraca adalah residual dari laporan penghasilan (*income statement*).
- Liabilitas seperti beban-akrual (*accrued expenses*), pendapatan belum-terakui sebagai penghasilan (*unearned revenue*), pajak-tangguhan diletakkan dalam bingkai Laporan Kinerja atau Laba-Rugi, bukan bingkai neraca.
- Neraca ANH memang tidak terfokus pada nilai kini, namun lebih kepada akuntabilitas agen. Neraca tak melukiskan secara-lengkap/baik nilai-entitas pada tanggal LK, tergolong info boleh-diabaikan.
- Kinerja meraih hasil (*earnings*) memberi informasi nilai-tambah kegiatan-operasional entitas LK, berdaya-prediksi menggambarkan ekspektasi hasil di masa yang akan datang kalau kinerja masa-lalu dapat diulang/ dipertahankan, diperbaiki, disempurnakan manajemen entitas.
- ANH tak memberi info nilai dalam risiko (*value at risk*), ANH memberi info guncangan nilai, hasil/earning menggambarkan guncangan operasional, kinerja produksi & pemasaran, dan guncangan atau perubahan besarnya biaya dan beban.
- ANH memandu evaluasi kinerja input & pemasok, evaluasi kinerja output atau evaluasi kinerja-pemasaran (kinerja pemasaran atau kinerja 4 P).
- Nisbah harga vs nilai-buku (*price to book value*) tak sama-dengan 1, hasil-aktual tanggal-neraca terasumsi dapat di ulang atau diperbesar di masa-depan, tergantung kelihaihan/kemampuan manajemen entitas LK. Berpijak pada kinerja masa lalu, entitas menentukan target besar-pulangan di butuhkan (*required rate of return*) di muka, manajemen membuat rencana-kerja mencapainya. Informasi ANW kurang- memungkinkan sebagai basis pijakan perencanaan-manajemen.
- Tuduhan bahwa informasi ANH memandang masa-lalu saja, ANH buta masa-depan, adalah tuduhan tak seberapa tepat.
- Nilai-kini (*current value*) dapat diperoleh pula dari LK berbasis ANH.

### KESIMPULAN DAN PENUTUP

Sumber tersebut diatas menyatakan bahwa prinsip untuk penerapan / praktik SAP Berbasis Nilai Wajar mencakupi Prinsip Satu-Lawan-Satu (*The One-to-One Principle*), Prinsip Mempertemukan (*The Matching Principle*), Prinsip Larangan Harga-Tetapan Sendiri, Prinsip Mendekati Kebenaran (*The Truing-up Principle*) dan Prinsip Atribut Campuran (*Mix Attribute Principle*).

Penulis menambahkan berbagai prinsip penerapan IPSAS berbasis ANW sebagai berikut.

- SAP berbasis ANW dapat menghasilkan LKPP/D berbasis ANH karena terdapat opsi model biaya (historis) atau *cost model* atau semacamnya pada PSAP Aset Tetap, PSAP Aset Tidak Berwujud, PSAP Investasi, PSAP Agrikultur dan PSAP Properti Investasi, yang dapat dipilih/ditetapkan PMK Pedoman Akuntansi.
- Opsi perlakuan akuntansi pada PSAP di pilih dan ditetapkan PMK Kebijakan Akuntansi Pemerintahan memenuhi syarat (1) intensi politis pemerintahan / kabinet baru, misalnya LKPP/D hendaknya menggambarkan nilai-wajar agar berterima global, (2) kebutuhan pengguna-utama LKPP/D , misalnya DPR/D untuk info LK berdasar opsi terpilih tersebut pada butir 1, (3) pilihan model hendaknya konsisten lintas PSAP, misalnya Model Revaluasi (*Revaluation Model*) atau secamanya diterapkan secara seragam bagi pengajian Aset Tetap, Aset Nir Wujud, Properti Investasi dan Aset Agrikultur.
- Prinsip Kemudahan (*expediency principle*) digunakan dalam PMK Sistem Akuntansi bagi LKPP Berbasis ANW mempertimbangkan pilihan-kebijakan akuntansi tersedia pada tiap SPAP yang mudah-terap, bebas-galat, ekonomis-efisien, dan dipastikan memperoleh opini WTP atas audit LK.
- Prinsip Kemurnian ANW digunakan PMK Sistem Akuntansi Berbasis ANW dengan selalu memilih opsi Model Revaluasian atau semacamnya pada tiap SPAP, selalu menghindari pilihan Model Biaya atau semacamnya, agar LK membiaskan secara optimal nilai-wajar, dan berkualitas tertinggi di antara LK Pemerintahan negara-negara lain. Hampiran LK berbasis ANW Paripurna ini terkait pada emisi SBN, SUN NKRI dan/atau semacamnya di Pasar Modal Internasional, LK juga berguna sebagai dasar negara pemberi-pinjaman untuk evaluasi kondisi-keuangan NKRI.

Pada dunia yang makin berbasis kecerdasan artifisial dan penuh konsultan sistem akuntansi bertaraf-dunia, asumsi bahwa pelaku akuntansi pemerintahan, misalnya pemerintah-daerah, tak-mampu secara intelektual menerapkan PMK Pedoman Akuntansi Pemerintahan Berbasis Nilai Wajar, menggambarkan rasa rendah-diri atau kurang percaya-diri bangsa itu



**07**

**Laporan  
Pelaksanaan  
Tugas  
Keseekretariatan  
dan Pengelolaan  
Keuangan KSAP**

Sesuai dengan Keppres Nomor 84 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “untuk melaksanakan tugasnya, KSAP dibantu oleh suatu sekretariat, yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Komite Konsultatif.” Tugas Kesekretariatan saat ini dilaksanakan oleh Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan yang berada pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hal ini mengacu pada PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa “Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemberian dukungan teknis terhadap pengembangan dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, melaksanakan koordinasi pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah serta pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.”

## PELAKSANAAN DAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KSAP

### 1. Dukungan Administrasi Keanggotaan dan Persuratan KSAP

Satker KSAP melaksanakan seluruh dukungan administrasi keanggotaan dan persuratan KSAP. Dukungan keanggotaan tersebut diantaranya pembuatan berbagai Surat Keputusan (SK) maupun Surat Tugas (ST) bagi anggota KSAP, sedangkan layanan persuratan meliputi layanan surat menyurat terkait konsultasi SAP dan layanan persuratan internal.

### 2. Fasilitas Kegiatan Rapat KSAP Tahun 2024

No.	Jenis Layanan	Jumlah
1.	Rapat Pleno	33 kegiatan
2.	Rapat Pleno Komite Konsultatif	2 kegiatan

3.	Focus Group Discussion	7 kegiatan
4.	Rapat Tim Kecil	18 kegiatan
5.	Rapat Pembahasan RPMK PSAP 18 dan 19	3 kegiatan
6.	Rapat Pembahasan RPMK PSAP 20 dan 21	2 kegiatan
7.	Rapat Pembahasan RPMK PSAP sebagai Satu Kesatuan Buku	1 kegiatan
8.	Rapat dengan Asian Development Bank	2 kegiatan

### 3. Penyusunan Konsep Laporan Tahunan KSAP

Laporan Tahunan KSAP Tahun 2023 telah dibuat dan dipublikasikan pada laman KSAP. Laporan tersebut berisi seluruh pencapaian KSAP selama tahun 2023 serta sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi terhadap seluruh kegiatan KSAP selama satu tahun. Laporan Tahunan KSAP Tahun 2023 dapat diakses secara online melalui:

**[Laporan Tahunan KSAP 2023](#)**

### 4. Pemeliharaan Website & Media Sosial KSAP

Pemeliharaan serta update konten pada website KSAP dilakukan secara berkala dan rutin. Sampai dengan Desember 2024, telah diterbitkan sebanyak 24 artikel maya pada website [www.ksap.org](http://www.ksap.org). Artikel-artikel maya tersebut berisi mengenai makalah dan majalah maya buah hasil pemikiran baik dari para anggota maupun dari para pemangku kepentingan KSAP mengenai standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, dimuat juga berbagai informasi dan update kegiatan yang dilaksanakan oleh KSAP.

Selain website, sekretariat KSAP juga mengelola media sosial lainnya yaitu instagram dan youtube. Konten-konten yang diunggah di media sosial instagram adalah konten edukasi mengenai PSAP dan informasi update media sosial instagram adalah konten edukasi mengenai PSAP dan informasi update kegiatan yang dilaksanakan oleh KSAP. Selain website, sekretariat KSAP juga mengelola media sosial lainnya yaitu instagram dan youtube. Konten-konten yang diunggah di media sosial instagram adalah konten edukasi mengenai PSAP dan informasi update mengenai akuntansi. Sedangkan media sosial youtube digunakan untuk penayangan kegiatan secara live baik public hearing, sosialisasi maupun training of trainers mengenai PSAP.

#### 5. Dukungan Penyediaan Materi sebagai Bahan Rapat

Tugas dan tanggungjawab lain dari Sekretariat KSAP adalah sebagai unit pendukung dalam penyediaan materi bahan rapat yang akan digunakan oleh anggota KSAP. Di tahun 2024, seluruh kegiatan yang melibatkan KSAP, sekretariat turut serta secara aktif dalam dukungan penyediaan materi.

#### 6. Dukungan Finalisasi Draf PSAP menjadi PMK

Sekretariat KSAP juga mendukung dalam proses finalisasi pengesahan draf PSAP melalui PMK. Dukungan tersebut berupa kegiatan *proofreading* draf final PSAP yang telah diselesaikan. Kemudian dilanjutkan dengan proses koordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Keuangan selaku *unit in charge* yang menangani penerbitan PMK. Di tahun 2024, sekretariat telah melakukan dukungan dalam proses penerbitan PMK untuk PSAP Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran serta PSAP Pengaturan Bersama.

#### 7. Dukungan Penyusunan Bunga Rampai

Selain PSAP, produk lain yang dihasilkan oleh KSAP adalah Bunga Rampai. Bunga Rampai KSAP merupakan kompilasi surat-surat berisi pertanyaan maupun konsultasi mengenai akuntansi beserta dengan jawaban yang telah disusun oleh KSAP. Sekretariat KSAP berperan sebagai kompilator dan publikasi. Bunga Rampai Tahun 2024 keseluruhannya telah dipublikasi di *website* resmi KSAP.

#### PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT KSAP

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Satuan kerja (satker) sementara di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Dalam hal pengelolaan keuangan, terdapat dua kegiatan utama yang dilaksanakan, yaitu:

##### 1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga dan Rencana Anggaran

Penyusunan rencana anggaran berdasar pagu Indikatif maupun pagu Definitif tahun anggaran 2024 telah selesai disusun dan menghasilkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan nomor SP DIPA-015.08.439165/2024 tanggal 30 November 2023.

##### 2. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Satker Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Pagu KSAP pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.995.358.000 dengan nomor SP DIPA-015.08.439165/2024 tanggal 30 November 2023. KSAP melakukan *self blocking* sesuai dengan Instruksi Menteri Keuangan sehingga DIPA KSAP menjadi sebesar Rp3.944.163.000. Demi kelancaran proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, KSAP membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang pada tahun 2024 memiliki susunan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	Esti Dwi Arvina
2.	Pejabat Pembuat Komitmen	Achmad Fauzi
3.	Pejabat Penandatangan SPM	Hazmi Muzakki
4.	Bendahara Pengeluaran	Satria Mahardika
5.	Staff Pengelola Keuangan	1. Michael Orsted S. 2. Eka Rizkia Nabila

Laporan Keuangan satker KSAP sebagai bentuk tanggungjawab pengelolaan anggaran disusun setiap dua kali dalam tahun (disusun secara semesteran). Untuk periode pelaporan tahun anggaran 2024, Laporan Keuangan satuan kerja KSAP telah disusun dan dikirim ke Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan tepat waktu sesuai dengan surat KSAP nomor ND-91/PB.61/2025 tanggal 31 Januari 2025.



# 08

# Penutup

Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh dinamika bagi KSAP. Sejumlah capaian signifikan telah diraih dalam upaya mengakselerasi penyelesaian PSAP. Hal ini sejalan dengan komitmen KSAP untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dan transparan kepada publik.

Salah satu fokus utama KSAP pada tahun ini adalah penyelesaian PSAP yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Beberapa PSAP baru telah berhasil diterbitkan, mencakup berbagai aspek. Penyelesaian PSAP-PSAP ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif bagi entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan.

Dalam rangka mendukung implementasi PSAP, KSAP juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti BPK, Kementerian Keuangan, dan organisasi profesi akuntan. Kerja sama ini sangat penting untuk memastikan konsistensi penerapan standar akuntansi di seluruh tingkatan pemerintahan.

Melihat capaian yang telah diraih pada tahun 2024, KSAP semakin optimis dalam menghadapi tantangan ke depan. Ke depannya, KSAP akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas PSAP, memperluas cakupan tematik, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Salah satu tantangan yang akan dihadapi adalah semakin kompleksnya lingkungan bisnis dan pemerintahan. Oleh karena itu, KSAP perlu terus melakukan kajian terhadap perkembangan praktik akuntansi terbaik di dunia dan menyesuaikan PSAP dengan kondisi yang ada.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KSAP akan terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan demikian, KSAP berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara. Melalui penyelesaian PSAP dan berbagai kegiatan pendukung lainnya, KSAP berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

# PEMETAAN IPSAS & SAP

## Perbandingan PSAP Terhadap IPSAS (*Pairing PSAP to IPSAS*) Per Desember 2024

No	IPSAS	SAP	Perbedaan
1.	<i>The Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities</i>	Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan	Tidak ada perbedaan signifikan
2.	<i>IPSAS 1 Presentation of Financial Statements</i>	PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan	PSAP 1 mengatur entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tidak diatur dalam IPSAS 1
3.	<i>IPSAS 2 Cash Flow Statements</i>	PSAP 03 Laporan Arus Kas	Laporan Arus Kas (LAK) pada IPSAS 2 menambahkan arus kas yang tidak diatur dalam IPSAS 2
4.	<i>IPSAS 3 Accounting Policies, Change in Accounting Estimates and Errors</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak Dilanjutkan (Revisi 2020)</li> <li>IPSAP 04 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan</li> </ul>	Tidak ada perbedaan signifikan

# PEMETAAN IPSAS & SAP

## Perbandingan PSAP Terhadap IPSAS (*Pairing PSAP to IPSAS*) Per Desember 2024

No	IPSAS	SAP	Perbedaan
5.	<i>IPSAS 4 The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerangka Konseptual</li> <li>• PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan</li> <li>• PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas</li> <li>• PSAP 03 Laporan Arus Kas</li> <li>• PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan</li> <li>• PSAP 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016)</li> <li>• PSAP 09 Akuntansi Kewajiban</li> <li>• PSAP 12 Laporan Operasional</li> <li>• Buletin Teknis 12 Akuntansi Transaksi dalam Mata Uang Asing</li> <li>• Draf PSAP Pengaruh Selisih Kurs</li> </ul>	Tidak ada pengaturan mata uang fungsional dan translasi
6.	<i>IPSAS 05 Borrowing Cost</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PSAP 09 Akuntansi Kewajiban</li> <li>• Bultek 22 Akuntansi Utang Berbasis Akrua</li> <li>• draf PSAP Biaya Pinjaman</li> </ul>	Bunga dibebankan sesuai dengan PSAP 09 dan Bultek 22, tidak ada pengaturan kapitalisasi bunga seperti dalam IPSAS 05
7.	<i>IPSAS 06 Consolidated and Separate Financial Statements</i>	PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian	PSAP 11 menggunakan istilah entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang digabungkan atau dikonsolidasikan dan tidak mengenal konsep pengendalian, sehingga tidak ada pengaturan kepentingan minoritas

# PEMETAAN IPSAS & SAP

## Perbandingan PSAP Terhadap IPSAS (*Pairing PSAP to IPSAS*) Per Desember 2024

No	IPSAS	SAP	Perbedaan
8.	<i>IPSAS 7 Invesments in Associates</i>	PSAP 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016)	PSAP 06 menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi dalam asosiasi seperti dalam IPSAS 7, namun tidak mengatur perubahan metode jika kepemilikan berubah dan penyajian nilai investasi jika tanggal laporan keuangan investee dan investor berbeda
9.	<i>IPSAS 8 Interests in Joint Ventures</i>	IPSAS 8 sudah diamandemen ke IPSAS 37 <i>Joint Arrangement</i> . Tidak perlu diperbandingkan	
10.	<i>IPSAS 9 Revenue From Exchange Transactions</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas</li> <li>• PSAP 12 Laporan Operasional</li> <li>• Bultek 23 Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan</li> <li>• draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Pertukaran</li> <li>• <i>Superseded by IPSAS 47</i></li> </ul>	Substansi sama, namun PSAP 02, PSAP 12 dan Bultek 23 tidak membedakan pendapatan yang berasal dari transaksi pertukaran dan non pertukaran seperti dalam IPSAS 9
11.	<i>IPSAS 10: Financial Reporting in Hyperinflationary Economies</i>	Belum ada	

# PEMETAAN IPSAS & SAP

## Perbandingan PSAP Terhadap IPSAS (*Pairing PSAP to IPSAS*) Per Desember 2024

No	IPSAS	SAP	Perbedaan
12.	<i>IPSAS 11 Construction Contracts</i>	Belum ada	
13.	<i>IPSAS 12 Inventories</i>	PSAP 05 Akuntansi Persediaan	PSAP 05 tidak menggunakan penilaian metode <i>lower of cost and net realizable value</i> namun hanya menggunakan nilai perolehan, namun pengungkapan ketika persediaan rusak diperlukan.
14	<i>IPSAS 13 Leases</i>	<i>(superseded by IPSAS 39)</i>	<i>(superseded by IPSAS 43)</i>
15.	<i>IPSAS 14 Events after the Reporting Date</i>	PSAP 15 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan	
16.	<i>IPSAS 15 Financial Instruments: Disclosure and Presentation</i>		IPSAS 15 telah digantikan dengan IPSAS 28, IPSAS 29, dan IPSAS 30.
17.	<i>IPSAS 16 Investment Property</i>	PSAP 17 Properti Investasi	

# PEMETAAN IPSAS & SAP

## Perbandingan PSAP Terhadap IPSAS (*Pairing PSAP to IPSAS*) Per Desember 2024

No	IPSAS	SAP	Perbedaan
18.	<i>IPSAS 17 Property, Plant, And Equipment</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap</li> <li>• Bultek 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua</li> <li>• Superseed by IPSAS 45</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PSAP menggunakan metode biaya dan revaluasi hanya diperkenankan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.</li> <li>• Dalam depresiasi, PSAP tidak mengatur adanya nilai residu dan tidak mengatur review masa manfaat, nilai residu dan metode depresiasi setiap tanggal pelaporan.</li> <li>• PSAP tidak mengatur impairment seperti IPSAS</li> </ul>
19.	<i>IPSAS 18 Segment Reporting</i>	Belum ada	Tidak ada pengaturan
20.	<i>IPSAS 19 Provisions, Contingent Liabilities, Contingent Assets</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PSAP 09 Akuntansi Kewajiban</li> <li>• Bultek 22 Akuntansi Utang Berbasis Akrua</li> <li>• draf PSAP Provisi, Kewajiban kontinjensi, dan aset kontinjensi</li> </ul>	PSAP dan Bultek belum mengatur mengenai Aset Kontinjen, sebagaimana diatur dalam IPSAS 19. Provisi akan diakui jika telah dianggarkan.

# PEMETAAN IPSAS & SAP

## Perbandingan PSAP Terhadap IPSAS (*Pairing PSAP to IPSAS*) Per Desember 2024

No	IPSAS	SAP	Perbedaan
21.	<i>IPSAS 19 Provisions, Contingent Liabilities, Contingent Assets</i>	Proses drafting	
22.	<i>IPSAS 21 Impairment of Non-Cash Generating Assets</i>	Proses drafting	
23.	<i>IPSAS 22 Disclosure of Financial Information about the General Government Sector</i>	Proses drafting	
24.	<i>IPSAS 23 Revenue From Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran</li> <li>• Superseed by IPSAS 47</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat beberapa paragraf dalam IPSAS 23 yang tidak dirujuk yakni: 37, 38, 43, 46, 61, 62, 64, 69, 79, 80, 86, 90, 91, 92, 104, dan 113</li> <li>• Terdapat penambahan beberapa paragraf standar dan paragraf penjelasan yang bersifat menegaskan, yaitu: Par 57 dan Par 75-81</li> </ul>

# PEMETAAN IPSAS & SAP

## Perbandingan PSAP Terhadap IPSAS (*Pairing PSAP to IPSAS*) Per Desember 2024

No	IPSAS	SAP	Perbedaan
25.	<i>IPSAS 24 Presentation of Budget Information in Financial Statements</i>	PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas	PSAP 02 mengatur pencatatan dan pelaporan anggaran dalam Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas. Pelaporan dan pengungkapan informasi realisasi anggaran dalam PSAP 02 lebih lengkap.
26.	<i>IPSAS 25 Employee Benefits</i>	<i>(superseded by IPSAS 39)</i>	<i>(superseded by IPSAS 39)</i>
27.	<i>IPSAS 26 Impairment of Cash Generating Assets</i>	Proses drafting	Tidak diatur penurunan nilai, namun aset yang mengalami kerusakan diungkapkan dalam laporan keuangan.
28.	<i>IPSAS 27 Agriculture</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap</li> <li>• Buletin Teknis No 15 Aset Tetap Akrua</li> <li>• Draf PSAP Agrikultur</li> </ul>	PSAP 07 dan Buletin Teknis No 15 mengatur Aset Tetap Lainnya termasuk Aset Pertanian, berupa hewan, ikan, dan tanaman. Pengukuran menggunakan harga perolehan dan metode biaya seperti aset tetap tidak sebagai aset biologis seperti pada IPSAS 27.

# PEMETAAN IPSAS & SAP

## Perbandingan PSAP Terhadap IPSAS (*Pairing PSAP to IPSAS*) Per Desember 2024

No	IPSAS	SAP	Perbedaan
29.	<i>IPSAS 28 Financial Instruments: Presentation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan</li> <li>• PSAP 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016)</li> <li>• PSAP 09 Akuntansi Kewajiban</li> <li>• Bultek 16 Piutang Berbasis Akrua</li> <li>• Draf Paket PSAP Instrumen Keuangan</li> </ul>	Penyajian instrumen keuangan diatur secara umum dalam PSAP 01, sebagai investasi jangka pendek dan pinjaman diatur dalam PSAP 06, kewajibandiatur dalam PSAP 09 dan piutang diatur dalam Bultek 16.
30.	<i>IPSAS 29 Financial Instruments: Recognition and Measurement</i>	(superseded by IPSAS 41)	(superseded by IPSAS 41)
31.	<i>IPSAS 30 Financial Instruments: Disclosure</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan</li> <li>• PSAP 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016)</li> <li>• PSAP 09 Akuntansi Kewajiban</li> <li>• Draf PSAP Instrumen Keuangan - Penyajian</li> </ul>	Pengungkapan instrumen keuangan telah diatur secara umum dalam PSAP 04 dan secara khusus dalam PSAP 06 terkait pengungkapan instrumen investasidan PSAP 09 terkait pengungkapan instrumen kewajiban.

# PEMETAAN IPSAS & SAP

## Perbandingan PSAP Terhadap IPSAS (*Pairing PSAP to IPSAS*) Per Desember 2024

No	IPSAS	SAP	Perbedaan
32.	<i>IPSAS 31 Intangible Assets</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buletin Teknis Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua</li> <li>• PSAP 14 Aset Tak Berwujud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bultek menggunakan metode biaya dan revaluasi hanya diperkenankan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.</li> <li>• Dalam amortisasi Bultek / Draft PSAP tidak mengatur adanya nilai residu dan tidak mengatur review masa manfaat, nilai residu dan metode depresiasi setiap tanggal pelaporan.</li> <li>• PSAP tidak mengatur impairment seperti IPSAS</li> </ul>
33.	<i>IPSAS 32 Service Concession Arrangement: Grantor</i>	PSAP 16 Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi	Terdapat hal-hal perbedaan yang membutuhkan penyesuaian untuk dapat diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah

# PEMETAAN IPSAS & SAP

## Perbandingan PSAP Terhadap IPSAS (*Pairing PSAP to IPSAS*) Per Desember 2024

No	IPSAS	SAP	Perbedaan
34.	<i>IPSAS 33: First Time Adoption of International Public Sector Accounting Standards</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buletin Teknis 01 untuk Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat</li> <li>• Buletin Teknis 02 untuk Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah</li> <li>• IPSAP 4 untuk Perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan</li> </ul>	IPSAP dan Buletin Teknis diharapkan dapat menjembatani entitas dalam penerapan akrual pertama kali dari basis kas menuju akrual.
35.	<i>IPSAS 34 Separate Financial Statements</i>	Belum ada	Praktik dalam penyusunan laporan pemerintah, tidak ada konsolidasi dengan perusahaan milik negara, sehingga laporan keuangan pemerintah merupakan keuangan tersendiri.
36.	<i>IPSAS 35 Consolidated Financial Statements</i>	PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian	PSAP 11 mengatur konsolidasi dengan entitas akuntansi dan pelaporan untuk tujuan pertanggungjawaban, sehingga dasarnya bukan pengendalian seperti dalam IPSAS 35.

# PEMETAAN IPSAS & SAP

## Perbandingan PSAP Terhadap IPSAS (*Pairing PSAP to IPSAS*) Per Desember 2024

No	IPSAS	SAP	Perbedaan
37.	<i>IPSAS 36 Investment in Associates and Joint Ventures</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>PSAP 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016)</i></li> <li>• <i>draf PSAP Investasi pada Asosiasi</i></li> </ul>	PSAP 06 tidak mengatur impairment losses, perubahan pencatatan dalam investasi asosiasi. Tidak ada pengatur untuk pengendalian seperti dalam IPSAS 36.
38.	<i>IPSAS 37 Joint Arrangements</i>	PSAP 19 Pengaturan Bersama	Terdapat beberapa pragraf dalam IPSAS 37 yang tidak diatur yakni: 7, 8, 23, 24, 24A, 26, 29, 30, 31, 39, 41, 41A, 42, 42A, 42B, 42C, 42D, 42E, 43, dan 44
39.	<i>IPSAS 38 Disclosure of Interest in other Entities</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan</li> <li>• PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan</li> <li>• PSAP 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016)</li> </ul>	PSAP 01, PSAP 04 dan PSAP 06 mengatur secara umum pengungkapan investasi pada entitas lain namun belum detail seperti dalam IPSAS 38
40.	<i>IPSAS 39 Employee Benefit</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas</li> <li>• PSAP 09 Akuntansi Kewajiban</li> <li>• PSAP 12 Laporan Operasional</li> <li>• Bultek 22 Akuntansi Utang Berbasis Akrua</li> <li>• Draf PSAP Imbalan Kerja</li> </ul>	IPSAS 25 mengatur <i>employee benefit</i> dengan pendekatan akrual. PSAP mengatur beban gaji dan pension sebesar jumlah yang dibayarkan namun belum ada pembentukan pencadangan

# PEMETAAN IPSAS & SAP

## Perbandingan PSAP Terhadap IPSAS (*Pairing PSAP to IPSAS*) Per Desember 2024

No	IPSAS	SAP	Perbedaan
41.	<i>IPSAS 40 Public Sector Combinations</i>	Belum ada	
42.	<i>IPSAS 41 financial Instruments</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PSAP 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016)</li> <li>• PSAP 09 Akuntansi Kewajiban</li> <li>• Draf PSAP Instrumen Keuangan – Pengungkapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengakuan dan pengakuan diklasifikasikan berdasarkan jenis instrumen yaitu investasi jangka pendek dan Panjang, kewajiban dan piutang.</li> <li>• Pengukuran dengan menggunakan harga perolehan.</li> <li>• Penurunan nilai piutang berdasarkan estimasi.</li> </ul>
43.	<i>IPSAS 42 Social Benefits</i>	Proses Drafting	
44.	<i>IPSAS 43 Leases</i>	Draf PSAP Sewa	
45.	<i>IPSAS 44 Non-Current Assets Held for Sale and Discounted Operations</i>	Belum ada	
46	<i>IPSAS 45 Property, Plant, and Equipment</i>	Revisi PSAP 07 Aset tetap	



# PEMETAAN IPSAS & SAP

## Perbandingan PSAP Terhadap IPSAS (*Pairing PSAP to IPSAS*) Per Desember 2024

No	IPSAS	SAP	Perbedaan
47.	<i>IPSAS 46 Measurement</i>	Draf PSAP Pengukuran	
48.	<i>IPSAS 47 Revenue</i>	Draf PSAP Pendapatan	
49.	<i>IPSAS 48 Transfer Expenses</i>	Belum Ada	
50	<i>IPSAS 49 Retirement Benefit Plans</i>	Belum Ada	

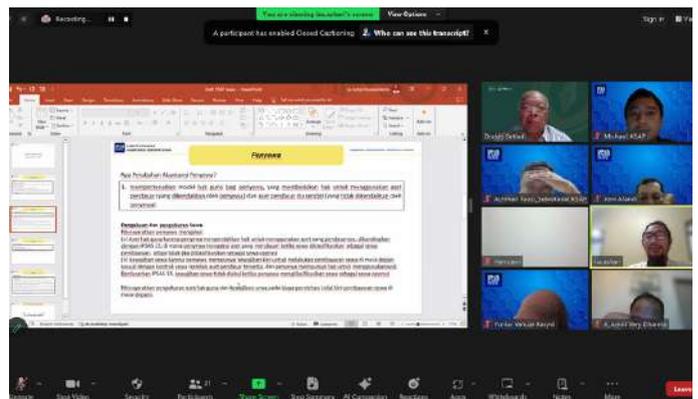
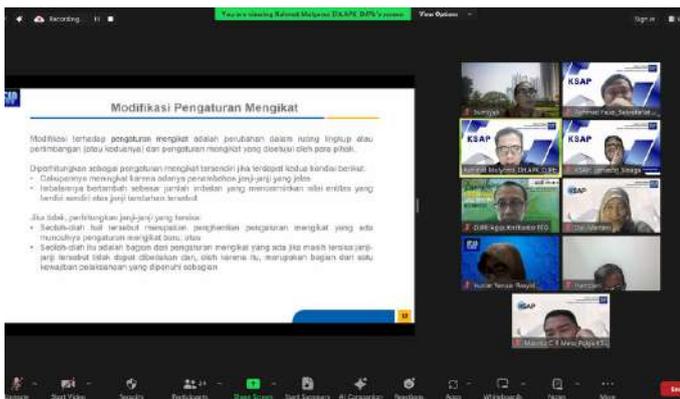
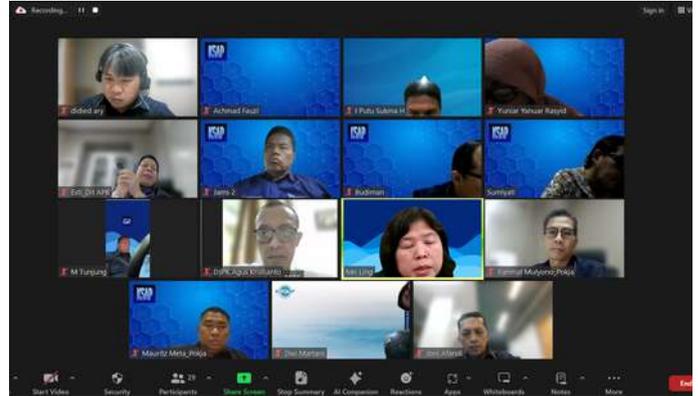
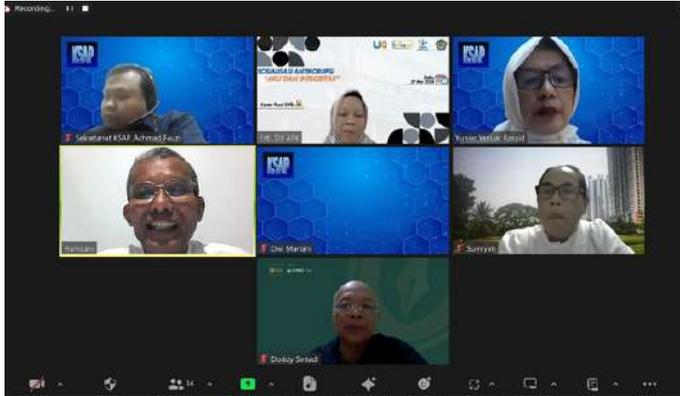


# Dokumentasi Kegiatan

## Rapat Pleno Komite Konsultatif KSAP

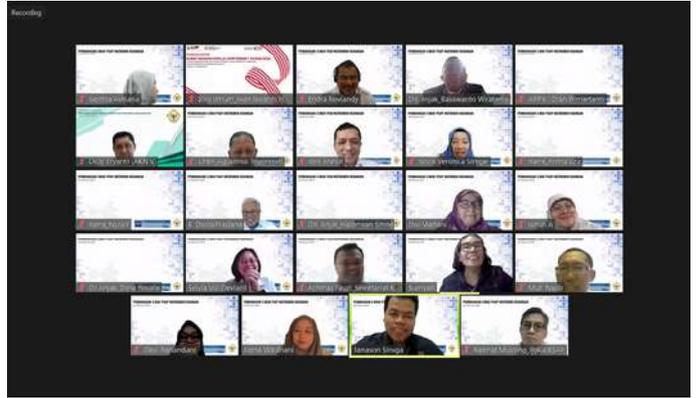


# Dokumentasi Kegiatan Rapat Pleno Mingguan KSAP



# Dokumentasi Kegiatan

## *Focus Group Discussion*



# Dokumentasi Kegiatan KSAP Goes to Campus

## Universitas Tanjungpura, Pontianak



## Universitas Tadulako, Palu



## Universitas Andalas, Padang



# Dokumentasi Kegiatan

## Fasilitasi Kegiatan KSAP





**KOMITE STANDAR  
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**  
*GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE*

**Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan**

Gedung Prijadi Praptosuharjo III, Lantai 3

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta Pusat

**[sekretariat.ksap@gmail.com](mailto:sekretariat.ksap@gmail.com)**